



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2023-2026



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dikarenakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah dapat disusun dengan baik. Rencana Strategis (Renstra) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023 – 2026.

Dalam rangka penyediaan instrumen pengukuran kinerja instansi pemerintah yang berkorelasi dengan pencapaian visi, misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dilakukan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2023-2026.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya.

Demikian Perubahan Renstra ini kami susun, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya mewujudkan visinya.

Kepala

Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,




Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI
NIP. 19640915 199002 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 10 |
| 2.2 Sumber Daya..... | 18 |
| 2.2.1 Kondisi Kepegawaian..... | |
| 2.2.2 Kondisi Prasarana dan Sarana (ASSET)..... | |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika | 32 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... | 57 |
| 2.4.1 Tantangan..... | |
| 2.4.2 Peluang | |
| | |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA..... | 60 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan | 60 |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 62 |

| | |
|--|-----------|
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra | 64 |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 74 |
| 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 75 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 77 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah..... | 77 |
| 4.1.1 Tujuan | |
| 4.1.2 Sasaran | |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 80 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 84 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 97 |
| BAB VIII PENUTUP | 98 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah (PD) ditetapkan dengan peraturan pimpinan perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Kemudian Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Gubernur untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta

memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD Provinsi Tahun 2023-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2023-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun RPJPD Tahun 2023 – 2026, selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 5 tahun.

Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Renstra PD Provinsi dengan memperhatikan :

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan Tahun 2021;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome).
4. Isu-isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;

7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perangkat daerah (PD) yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanannya kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan peran sebagai integrator pada setiap proses bisnis setiap PD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai PD yang menjalankan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral provinsi serta persandian, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kurun waktu (5) lima tahun kedepan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023-2026 sesuai dengan disusun menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 - 2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

- Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 18. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 22. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
 24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023- 2026 adalah sebagai pedoman arah pembangunan dan penjabaran visi, misi, strategi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi yang ada yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program dan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi dan informatika.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023- 2026 adalah Menerjemahkan visi dan misi Dinas Kominfo ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2023-2026, yang disertai dengan program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan agar penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat lebih terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan sebagai alat untuk mencapai apa yang telah terjabarkan dalam visi dan misi Pembangunan Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini Memuat informasi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan dan Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, indikator kinerja serta target selama 5 tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan strategi dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran dan kebijakan untuk menjadi pedoman strategi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini Memuat tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih Selain itu pada bab ini juga menguraikan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan atau indikator kinerja program pada masing-masing urusan pemerintahan.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja serta rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

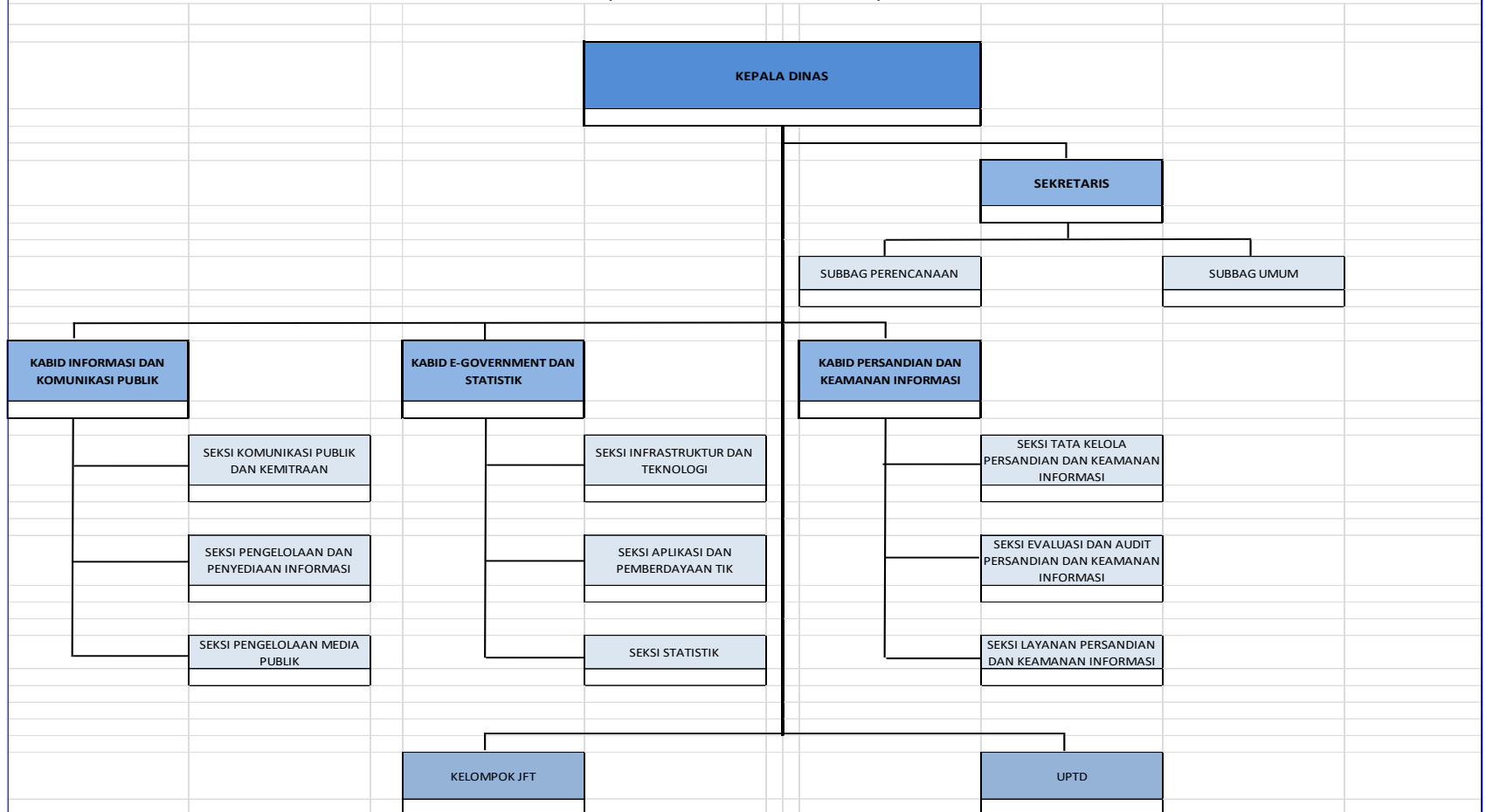
b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
2. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pengelolaan *E-Government*, Domain Instansi Penyelenggara Negara, Persandian, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah;
3. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Kepala Diskominfo yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang E-Government, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Gambar 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
(PERGUB 6 TAHUN 2021)**



Sebagaimana Gambar diatas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan tipe organisasi B, dimana masing-masing unsur dari organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

a. Tugas:

Memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
6. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
8. penyelenggaraan pembinaan Pegawai ASN; dan
9. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

a. Tugas

Mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi dinas yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang.

b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan dilingkungan dinas;
2. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
4. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
5. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

6. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu Perencanaan dan Umum, dengan tugas :

SUBBAGIAN PERENCANAAN

Subbagian perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab dibawah Sekretaris yang bertugas melakukan Penyusunan serta pengembangan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana, program dan kegiatan;

Fungsi:

1. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dinas;
2. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perencanaan;
3. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
4. pelaksanaan perencanaan pengelolaan data dan informasi;
5. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPAK, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup dinas;
6. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan fasilitasi dan koordinasi SAKIP;
7. pelaksanaan koordinasi dan menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
8. pelaksanaan perencanaan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
9. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian program dinas serta UPTD;

10. pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas serta UPTD;
11. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi dan informatika;
12. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis pelaksanaan perencanaan;
13. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
14. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

SUBBAG UMUM

Subbagian Umum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Tugas

Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan dinas.

b. Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja Subbagian Umum;
2. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis umum dan keuangan;
3. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan kearsipan;
4. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan kepustakaan;
5. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan data kepegawaian;

6. Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan efisiensi dan tata laksana;
8. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
9. Pelaksanaan perencanaan kehumasan dinas;
10. Pelaksanaan perencanaan kerumahtanggaan dinas;
11. Pelaksanaan perencanaan pelayanan perbendaharaan keuangan;
12. pelaksanaan perencanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
13. pelaksanaan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
14. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas;
15. pelaksanaan perencanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
16. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
17. pelaksanaan perencanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
18. pelaksanaan penyiapan bahan dan perencanaan fasilitasi dan koordinasi Reformasi Birokrasi;
19. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
20. pelaksanaan pembinaan Pegawai ASN; dan
21. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi Publik dan kemitraan, Pengelolaan dan penyediaan informasi serta Pengelolaan media Publik.

b. Fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Publik dan kemitraan;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan penyediaan informasi;
 3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan media Publik;
 4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan, Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi, Seksi Pengelolaan Media Publik, dengan tugas:
1. Seksi Komunikasi Publik dan Kemitraan : Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi Publik dan kemitraan;
 2. Seksi Pengelolaan dan Penyediaan Informasi : Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan penyediaan informasi;
 3. Seksi Pengelolaan Media Publik : Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan media Publik;

3. BIDANG e-GOVERNMENT DAN STATISTIK

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, Aplikasi dan pemberdayaan TIK serta Statistik.

b. Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi dan pemberdayaan TIK;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik;
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang E-Government dan Statistik terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK, Seksi Statistik, dengan tugas :

1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi : menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis infrastruktur dan teknologi.
2. Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK: Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi dan pemberdayaan TIK;
3. Seksi Statistik : Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Statistik;

4. BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMANSI

a. Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata Kelola, Evaluasi dan Audit serta Layanan Persandian dan Keamanan Informasi.

b. Fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi.
2. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi.
3. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Persandian dan Keamanan Informasi.
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu: Seksi tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi, Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi dan Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi dengan tugas :

1. Seksi tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi : penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi
2. Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi : penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi
3. Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi : penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan Persandian dan Keamanan Informasi.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Juli 2021, tercatat sebanyak 88 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan tingkat pendidikan kondisi Juli 2021 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

| NO | BIDANG | PENDIDIKAN (Orang) | | | | | | | TOTAL (orang) |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|------------------|
| | | SD | SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |
| 1 | Sekretariat | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 9 |
| 2 | IKP | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | 11 |
| 3 | E-GOV dan Statistik | - | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 7 |
| 4 | Persandian dan Keamanan Informasi | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | Jabatan Fungsional tertentu | - | - | - | 6 | 13 | 2 | - | 21 |
| 6 | Non PNS | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah Orang | | 0 | 0 | 6 | 17 | 25 | 4 | 2 | 54 |

Sumber: Bag. Umum Diskominfo

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi adalah Doktor (S3).

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan jenis kelamin (per juli 2021), dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Prov. Kep. Bangka Belitung
Berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO | BIDANG | JENIS KELAMIN (Orang) | | TOTAL (orang) |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Sekretariat | 4 | 5 | 9 |
| 2 | IKP | 6 | 5 | 11 |
| 3 | E-GOV dan Statistik | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Persandian dan Keamanan Informasi | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Jabatan Fungsional tertentu | 10 | 11 | 21 |
| 6 | Non PNS | | | 0 |
| Jumlah Orang | | 31 | 23 | 54 |

Sumber: Bag. Umum Diskominfo

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan kecuali di Sekretariat.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisi Juni 2022 terbanyak adalah pegawai Golongan III (64,81%). Secara lengkap komposisi pegawai Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Golongan

| NO | BIDANG | GOLONGAN (Orang) | | | | TOTAL (orang) |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Sekretariat | - | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 2 | IKP | - | 7 | 4 | - | 11 |
| 3 | E-GOV dan Statistik | - | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | Persandian dan Keamanan Informasi | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Jabatan Fungsional tertentu | - | - | 19 | 2 | 21 |
| 6 | Non PNS | - | - | - | - | - |
| Jumlah Orang | | 0 | 11 | 18 | 25 | 54 |
| Persentase (%) | | 0% | 20.37% | 64.81% | 14.81% | 100.00% |

2.2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana (ASSET)

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
Sarana dan Prasarana (ASSET)
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

| NO | NAMA BARANG | KODE BARANG | MERK | JUMLAH | | TAHUN PEROLEHAN |
|----|-------------|-----------------|----------|--------|---------|-----------------|
| | | | | TOTAL | RINCIAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | A.C. Split | 02.05.02.04.004 | POLYTRON | 25 | 13 | 2015 |
| | | | DAIKIN | | 3 | 2017 |
| | | | DAIKIN | | 8 | 2017 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|--|----|---|-----------------|
| | | | DAIKIN / FTNE50J EV14 | | 1 | 2017 |
| 2 | A.C. Window | 02.05.02.04.003 | panasonic CS-PC9JKJ 1 PK | 12 | 1 | 2010 |
| | | | LG | | 2 | 2011 |
| | | | LG 1/2 PK, Model S05LF4G-2 | | 1 | 2011 |
| | | | polytron | | 2 | 2013 |
| | | | SHARP AH-XP13NRY | | 1 | 2013 |
| | | | Toshiba | | 1 | 2013 |
| | | | SHARP / AU-A9MEY 1 PK | | 1 | 2014 |
| | | | Panasonic | | 3 | 2020 |
| 3 | Acces Point | 02.10.02.04.026 | UBIQUITI | 40 | 4 | 2016 |
| | | | UBIQUITI | | 6 | 2016 |
| | | | UBIQUITI | | 8 | 2016 |
| | | | UBIQUITI | | 12 | 2016 |
| | | | Unifi | | 10 | 2020 |
| 4 | Alat Dapur lainnya | 02.05.02.05.026 | - | 25 | 1 | 2012 |
| | | | BBC 255 motif | | 1 | 2012 |
| | | | Lucky | | 2 | 2012 |
| | | | Nyonya Dansa | | 1 | 2012 |
| | | | Triangle | | 1 | 2012 |
| | | | Bistro | | 1 | 2012 |
| | | | - | | 2 | 2014 |
| | | | - | | 1 | 2008 |
| | | | eagle | | 2 | 2008 |
| | | | eagle | | 4 | 2008 |
| | | | Aavara PB5000-R+ | | 4 | 2013 |
| | | | Aavara PB5000-S+ | | 4 | 2013 |
| | | | ATS (Automatic Transfer Switch) 100 KVA | | 1 | 2019 |
| | | | 5 | | alat komunikasi radio hf/fm lainnya (dst) | 02.06.02.03.005 |
| AMPLITUDE IRIG | 3 | 2017 | | | | |
| MOTOROLA | 2 | 2016 | | | | |
| MPPT | 2 | 2016 | | | | |
| ROCKET | 2 | 2016 | | | | |
| motorola | 6 | 2016 | | | | |
| - | 1 | 2007 | | | | |
| Yealink | 20 | 2013 | | | | |
| ganstream | 40 | 2013 | | | | |
| 6 | Alat Pemadam/Portable | 02.05.02.07.001 | APPROM | 4 | 1 | 2007 |
| | | | - | | 3 | 2008 |
| 7 | Alat Pencetak Label | 02.05.01.05.022 | - | 10 | 10 | 2015 |
| 8 | Alat Pendingin lainnya | 02.05.02.04.015 | Cooling dan Air System Climaveneta DAU/DAO 080 | 1 | 1 | 2019 |
| 9 | Alat Penghancur Kertas | 02.05.01.05.010 | Secure | 10 | 10 | 2008 |
| 10 | Alat Penghancur Kertas | 02.05.01.05.010 | SECURE-Ez-SC-10ABlack | 1 | 1 | 2014 |
| 11 | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 02.05.02.06.077 | LG | 11 | 1 | 2007 |
| | | | NYM 3 * 2,5 mm | | 1 | 2007 |
| | | | - | | 4 | 2011 |
| | | | - | | 1 | 2011 |
| | | | - | | 2 | 2013 |
| looktech | 2 | 2020 | | | | |
| 12 | Alat Spinker | 02.05.02.07.005 | Fire Suppression System Kidde FM-200 | 1 | 1 | 2019 |
| 13 | Alat Studio Lainnya | 02.06.01.06.001 | Channel / YM2010 | 6 | 2 | 2014 |
| | | | LOGITECH | | 2 | 2015 |
| | | | - | | 2 | 2014 |
| 14 | Amplifier | 02.05.02.06.005 | BMB | 1 | 1 | 2013 |
| 15 | Antene VHF/FM Portable | 02.06.03.08.001 | DIOMOND | 6 | 6 | 2016 |
| 16 | Antene VHF/FM Stationary | 02.06.03.08.003 | - | 2 | 1 | 2010 |
| | | | jampro fm 4 bay | | 1 | 2013 |
| 17 | Audio Amplifier | 02.06.01.01.005 | TOA | 9 | 1 | 2007 |
| | | | Axel 300watt | | 1 | 2010 |
| | | | Soundcraftmen | | 1 | 2010 |
| | | | Soundlap SM2000pro | | 1 | 2010 |
| | | | Synco Proaudio / Sp-1200 | | 1 | 2014 |
| | | | MIXER AUDIO 16 CHANNELS | | 3 | 2019 |
| | | | OMB, SOLIDYNE/MT-MR PLATINUM AUDIMAX 362 | | 1 | 2019 |
| 18 | Audio Processor | 02.06.03.23.012 | Composer Pro MDX 2600 | 1 | 1 | 2011 |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------|----------------------------|----|----|------|
| | Am | | | | | |
| 19 | Audio Visual | 02.06.01.01.025 | soundlab EQ3656pro | 2 | 1 | 2010 |
| | | | ULTRAGRAPH PRO FBQ 3102 | | 1 | 2011 |
| 20 | Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst) | 03.01.01.14.004 | - | 1 | 1 | 2015 |
| 21 | Bangunan Gedung Kantor Permanen | 03.01.01.01.001 | - | 2 | 1 | 2010 |
| | | | - | | 1 | 2015 |
| 22 | Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen | 03.01.01.30.001 | - | 1 | 1 | 2018 |
| 23 | Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai Lain-lain | 03.03.01.01.006 | - | 1 | 1 | 2009 |
| 24 | Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain | 04.02.07.04.005 | - | 1 | 1 | 2015 |
| 25 | Brandkas | 02.05.01.04.007 | Save Guard | 2 | 1 | 2008 |
| | | | Ichiban Safe / HS/c/xX-80a | | 1 | 2013 |
| 26 | Buffet Kaca | 02.05.03.07.009 | ORBITREND / GSR 1080 | 3 | 3 | 2016 |
| 27 | Camera Electronic | 02.06.01.02.003 | Sony | 15 | 1 | 2007 |
| | | | Nikon | | 2 | 2009 |
| | | | Nikon D7000 | | 1 | 2012 |
| | | | Nikon Coolpix S3300 | | 1 | 2012 |
| | | | Fuji Finepex S2980 | | 2 | 2013 |
| | | | Nikon D3100 | | 2 | 2013 |
| | | | NIKON D3200 | | 2 | 2014 |
| | | | NIKON D5200 | | 2 | 2015 |
| | | | NIKON D5500 | | 1 | 2015 |
| CANON 700D | 1 | 2015 | | | | |
| 28 | CCTV - Camera Control Television System | 02.05.01.05.002 | Monitoring System Styre | 1 | 1 | 2019 |
| 29 | Dispenser | 02.05.02.06.038 | - | 11 | 2 | 2009 |
| | | | Miyako 389 | | 1 | 2011 |
| | | | RSA | | 4 | 2012 |
| | | | miyako | | 2 | 2013 |
| | | | POLYTRON | | 1 | 2015 |
| | | | - | | 1 | 2019 |
| 30 | Display | 02.05.01.05.034 | Samsung | 12 | 4 | 2013 |
| | | | , LG 22M35 A-B | | 6 | 2014 |
| | | | LG ULTRA CURVED IPS LED | | 1 | 2017 |
| | | | LG CURVED | | 1 | 2017 |
| 31 | Facsimile | 02.06.02.01.010 | Faximile | 3 | 1 | 2013 |
| | | | Panasonic/KX-FP 711 CX | | 1 | 2013 |
| | | | Bavo/ FG40 Pro/Plat Besi | | 1 | 2014 |
| 32 | Filing Cabinet Besi | 02.05.01.04.005 | Brother | 33 | 15 | 2008 |
| | | | Lion 4 Laci | | 3 | 2011 |
| | | | brother | | 3 | 2013 |
| | | | lion- L 44 | | 3 | 2014 |
| | | | LION / L.44E | | 9 | 2016 |
| 33 | Focusing Screen/Layar LCD Projector | 02.05.01.05.053 | Toshiba | 3 | 1 | 2007 |
| | | | APOLLO/TRIPOD TRS-240 | | 2 | 2015 |
| 34 | Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan | 06.01.01.01.003 | - | 1 | 1 | 2018 |
| 35 | Gedung Garasi/Pool Permanen | 03.01.01.14.001 | - | 1 | 1 | 2014 |
| 36 | Global Positioning System | 02.03.03.01.072 | magelan triton 400 | 1 | 1 | 2008 |
| 37 | Global Positioning System | 02.03.03.01.072 | Garmin GPS 60 | 1 | 1 | 2008 |
| 38 | Handy Cam | 02.05.02.06.048 | Sony | 3 | 1 | 2007 |
| | | | Sony | | 1 | 2008 |
| | | | Panasonic NV10000 | | 1 | 2009 |
| 39 | Handy Talky (HT) | 02.06.02.01.006 | ICOM AC V32 | 10 | 1 | 2007 |
| | | | Suicom Sh-135/430 | | 4 | 2008 |
| | | | ICOM/IC - M88 | | 1 | 2013 |
| | | | ICOM/IC - M88 | | 1 | 2013 |
| | | | icom/ic-m88 | | 1 | 2013 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|---|----|----|------|--|--|--|
| | | | ICOM/IC - M88 | | 1 | 2013 | | | |
| | | | ICOM/IC - M88 | | 1 | 2013 | | | |
| | | | - | | 2 | 2013 | | | |
| 40 | Hard Disk | 02.10.02.01.012 | WESTERN DIGITAL ELEMENT | 29 | 4 | 2014 | | | |
| | | | TOSHIBA CANVIO/DTP 2/0 | | 1 | 2016 | | | |
| | | | SEAGATE, 15K HDD V5 | | 15 | 2017 | | | |
| | | | TOSHIBA / CANVIO BASIC | | 2 | 2018 | | | |
| | | | WD My Passport New Red 4 TB | | 4 | 2019 | | | |
| | | | Harddisk External TOSHIBA | | 1 | 2019 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 41 | Hub | 02.10.02.04.003 | D-Link | 51 | 1 | 2008 | | | |
| | | | ATEN CS1316 | | 1 | 2012 | | | |
| | | | TP-Link, / TL-SM311LS | | 2 | 2014 | | | |
| | | | TP-LINK / MC210CS | | 2 | 2014 | | | |
| | | | TP-LINK / TL-SG3424P | | 10 | 2014 | | | |
| | | | EMULEX | | 10 | 2015 | | | |
| | | | TP-LINK / MEDIA CONVERTER MCS210CS | | 4 | 2018 | | | |
| | | | TP-LINK / TL-SG3216 | | 5 | 2018 | | | |
| | | | TP-LINK / TL-SG3210 | | 6 | 2018 | | | |
| | | | UBIQUITI / UNIFI SWITCH US-8 150W POE 2 SFP | | 9 | 2018 | | | |
| D-LINK / DGS-1016A 16 PORT GIGABIT SWITCH | 1 | 2018 | | | | | | | |
| 42 | Instalasi Benteng | 04.03.07.01.005 | - | 1 | 1 | 2009 | | | |
| 43 | Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK) | 04.03.07.01.004 | - | 1 | 1 | 2010 | | | |
| 44 | Karaoke | 02.05.02.06.011 | Geisler | 1 | 1 | 2013 | | | |
| 45 | Karpas | 02.05.02.06.057 | Nobel 6307 | 6 | 1 | 2010 | | | |
| | | | - | | 1 | 2011 | | | |
| | | | - | | 1 | 2012 | | | |
| | | | - | | 1 | 2012 | | | |
| | | | laminas | | 1 | 2014 | | | |
| | | | - | | 1 | 2019 | | | |
| 46 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 02.05.02.05.002 | RINNAI RI-522 CE | 1 | 1 | 2014 | | | |
| 47 | Komputer Jaringan lainnya | 02.10.01.01.008 | RJ 45 | 22 | 1 | 2007 | | | |
| | | | - | | 4 | 2009 | | | |
| | | | - | | 1 | 2010 | | | |
| | | | the amp Netconnect | | 1 | 2013 | | | |
| | | | - | | 12 | 2015 | | | |
| | | | - | | 1 | 2015 | | | |
| | | | ALFRESCO | | 1 | 2015 | | | |
| | | | E-MONEP | | 1 | 2015 | | | |
| 48 | Komputer Unit Lainnya | 02.10.01.03.001 | - | 29 | 1 | 2008 | | | |
| | | | - | | 6 | 2008 | | | |
| | | | - | | 6 | 2008 | | | |
| | | | MARUSIN | | 16 | 2016 | | | |
| 49 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II | 02.05.03.05.004 | indachi | 3 | 3 | 2008 | | | |
| 50 | Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III | 02.05.03.05.005 | indachi | 60 | 60 | 2008 | | | |
| 51 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 02.05.03.03.008 | racuda | 19 | 2 | 2008 | | | |
| | | | racuda | | 2 | 2008 | | | |
| | | | racuda | | 12 | 2008 | | | |
| | | | - | | 3 | 2011 | | | |
| 52 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural | 02.05.03.03.008 | Indachi / Type D-375 | 41 | 3 | 2011 | | | |
| | | | Alexis / kursi staff | | 15 | 2011 | | | |
| | | | Indachi / Type D-375 | | 1 | 2011 | | | |
| | | | Indachi Roda 5 | | 4 | 2013 | | | |
| | | | ergotech 502T | | 1 | 2013 | | | |
| | | | FRONT LINE - OCS 2 Manager | | 2 | 2014 | | | |
| | | | ERGOTECH | | 15 | 2015 | | | |
| 53 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 02.05.03.03.004 | indachi | 8 | 1 | 2008 | | | |
| | | | Alexis / kursi 1 biro | | 4 | 2011 | | | |
| | | | - | | 1 | 2011 | | | |
| | | | - | | 1 | 2011 | | | |
| | | | Alexis / kursi 1 biro | | 1 | 2011 | | | |
| 54 | Kursi Kerja Pejabat | 02.05.03.03.005 | indachi | 5 | 4 | 2008 | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|---|----|----|------|
| | Eselon III | | indachi | | 1 | 2008 |
| 55 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 02.05.03.03.006 | indachi | 6 | 2 | 2008 |
| | | | indachi | | 4 | 2008 |
| | | | | | | |
| 56 | Kursi Kerja Pejabat lainnya | 02.05.03.03.009 | - | 5 | 5 | 2011 |
| 57 | Kursi Rapat | 02.05.02.01.030 | Fultura / Kursi Rapat | 61 | 7 | 2008 |
| | | | isol | | 20 | 2008 |
| | | | Chairman/SC90A / kursi rapat | | 3 | 2011 |
| | | | - | | 15 | 2011 |
| | | | futura | | 1 | 2013 |
| | | | FUTURA | | 15 | 2015 |
| 58 | Kursi Tamu | 02.05.02.01.031 | olympic | 25 | 5 | 2008 |
| | | | olympic | | 20 | 2008 |
| 59 | Lap Top | 02.10.01.02.002 | Toshiba | 29 | 1 | 2007 |
| | | | ASUS N56V Series | | 7 | 2012 |
| | | | Toshiba Intel Atom N570 | | 1 | 2012 |
| | | | Samsung AMD E-350 | | 1 | 2012 |
| | | | HP PAVILION g4 | | 3 | 2013 |
| | | | ASUS X456UQ | | 1 | 2016 |
| | | | HP BUSINESS NOTEBOOK 240 G5 WIN | | 2 | 2017 |
| | | | HP BUSINESS PROBOOK 430 G4 | | 2 | 2017 |
| | | | HP SPECTRE X360 13-AC049TU | | 2 | 2017 |
| | | | ASUS ROG GL502VM-BM113T | | 2 | 2017 |
| | | | APPLE MACBOOK PROWIYH RETINA | | 1 | 2017 |
| | | | ASUS TRANSFORMER 3 PRO (T303UA-GN047T-GRAY) | | 1 | 2017 |
| | | | ASUS STRIX | | 1 | 2017 |
| | | | DELL / VOSTRO 3468 | | 2 | 2018 |
| Laptop HP 240 G7 | 2 | 2019 | | | | |
| 60 | Layar Film/Projector | 02.06.01.02.105 | DELL | 8 | 1 | 2009 |
| | | | IN3124 | | 1 | 2012 |
| | | | - | | 1 | 2014 |
| | | | Infocus / IN300 | | 1 | 2014 |
| | | | EPSON/EB-W31 | | 3 | 2015 |
| | | | EPSON/EHTW5200 | | 1 | 2015 |
| 61 | Lemari Besi/Metal | 02.05.01.04.001 | lion | 23 | 15 | 2008 |
| | | | TASO / C75 | | 3 | 2016 |
| | | | LION / L.33 | | 4 | 2016 |
| | | | Krisbow | | 1 | 2020 |
| 62 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis | 02.05.03.07.007 | LION - L33 | 2 | 2 | 2014 |
| 63 | Lemari Es | 02.05.02.04.001 | - | 1 | 1 | 2019 |
| 64 | Lemari Kaca | 02.05.01.04.027 | - | 8 | 2 | 2008 |
| | | | Brother | | 2 | 2008 |
| | | | - | | 3 | 2008 |
| | | | WONDERFUL AD-04OC | | 1 | 2014 |
| 65 | Lemari Kayu | 02.05.01.04.002 | Multiplex | 1 | 1 | 2007 |
| 66 | Loudspeaker | 02.05.02.06.007 | - | 16 | 1 | 2007 |
| | | | - | | 4 | 2008 |
| | | | BMB | | 1 | 2013 |
| | | | CHANNEL | | 2 | 2013 |
| | | | Synco Proaudio / 815F | | 2 | 2014 |
| | | | EDIFIER X100 2.1 | | 6 | 2014 |
| 67 | Mainframe (Komputer Jaringan) | 02.10.01.01.001 | INFORTREND ESVA F75-2830L | 1 | 1 | 2015 |
| 68 | Meja 1/2 Biro | 02.05.02.01.024 | orbitrend | 10 | 10 | 2008 |
| | | | OST1080 | | 2 | 2011 |
| | | | OST1061 | | 8 | 2011 |
| 69 | Meja Kerja Besi/Metal | 02.05.02.01.001 | Ainmen | 8 | 7 | 2020 |
| | | | Entertainment | | 1 | 2020 |
| 70 | Meja Kerja Kayu | 02.05.02.01.002 | Grand Furniture | 60 | 1 | 2007 |
| | | | Grand Furniture | | 1 | 2007 |
| | | | Grand Furniture | | 2 | 2008 |
| | | | indachi | | 1 | 2010 |
| | | | Orbitrend / meja kerja 1 biro type OST 108 | | 5 | 2011 |

| | | | | | | |
|----|---|-----------------|--|----|----|------|
| | | | Orbitrend / meja kerja staff type OST 106 | | 16 | 2011 |
| | | | Modera Conference Type EOD 1260 | | 1 | 2011 |
| | | | dynamic obitrend murano lunar | | 1 | 2013 |
| | | | expo / MT3003 | | 2 | 2014 |
| | | | HORSE METAL (1 BIRO) | | 1 | 2015 |
| | | | SIANTANO / OT 150 | | 14 | 2016 |
| | | | - | | 1 | 2019 |
| | | | - | | 20 | 2020 |
| 71 | Meja Kerja Pegawai Non Struktural | 02.05.03.01.008 | orbitrend | 14 | 14 | 2008 |
| 72 | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 02.05.03.01.004 | expo | 1 | 1 | 2008 |
| 73 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 02.05.03.01.005 | orbitrend | 2 | 2 | 2008 |
| 74 | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 02.05.03.01.005 | orbitrend | 1 | 1 | 2008 |
| 75 | Meja Kerja Pejabat lain-lain | 02.05.03.01.009 | cofemo | 1 | 1 | 2012 |
| 76 | Meja Operator | 02.05.03.02.013 | Indachi Front Desk Set | 1 | 1 | 2013 |
| 77 | Meja Rapat | 02.05.02.01.008 | expo | 22 | 14 | 2008 |
| | | | - | | 6 | 2011 |
| | | | horse metal | | 1 | 2013 |
| | | | CUSTOM | | 1 | 2015 |
| 78 | Mesin Absensi | 02.05.01.05.012 | fingerfec | 1 | 1 | 2008 |
| 79 | Mesin Absensi | 02.05.01.05.012 | FINGERPLUS / FID 92 | 1 | 1 | 2017 |
| 80 | Mesin Fotocopy Folio | 02.05.01.03.007 | Canon 2018i | 2 | 1 | 2008 |
| | | | CANON / IR 2520 | | 1 | 2016 |
| 81 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 02.05.01.01.002 | Olivetti Linea 98 | 4 | 1 | 2008 |
| | | | Olivetti Linea 98 | | 3 | 2008 |
| 82 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner | 02.05.02.03.001 | Multi Pro | 4 | 1 | 2008 |
| | | | ELECTROLUX / Z931 | | 1 | 2016 |
| 83 | Meubeleur lainnya | 02.05.02.01.050 | - | 35 | 2 | 2011 |
| | | | Lucky | | 2 | 2012 |
| | | | - | | 1 | 2012 |
| | | | - | | 15 | 2013 |
| | | | - | | 1 | 2013 |
| | | | NAKO POLOS | | 1 | 2014 |
| | | | NAKO POLOS Bingkai Holo | | 1 | 2014 |
| | | | - | | 1 | 2014 |
| | | | - | | 7 | 2015 |
| | | | - | | 1 | 2015 |
| | | | - | | 1 | 2015 |
| | | | - | | 1 | 2019 |
| 84 | Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) | 02.02.01.02.002 | TOYOTA TYPE G M2.0 GASOLINE M/T / KIJANG INNOVA G AT | 1 | 1 | 2015 |
| 85 | Microphone | 02.05.02.06.014 | - | 16 | 3 | 2011 |
| | | | Seinheisser | | 2 | 2013 |
| | | | MIC WIRELESS RECEIVER DIGITAL | | 2 | 2019 |
| | | | MICHROPONE SIARAN CONDENSER | | 8 | 2019 |
| | | | ON AIR MICHROPHONE ARM | | 1 | 2019 |
| 86 | Microphone Table Stand | 02.05.02.06.016 | - | 17 | 4 | 2008 |
| | | | - | | 2 | 2010 |
| | | | - | | 3 | 2011 |
| | | | Technica AT2020 | | 3 | 2010 |
| | | | behringer | | 2 | 2013 |
| | | | behringer dan samson | | 2 | 2013 |
| | | | KREZT/4800 | | 1 | 2015 |
| 87 | Mini Komputer | 02.10.01.01.002 | HTC Shift | 3 | 3 | 2008 |
| 88 | Mixer PVC | 02.06.01.02.074 | - | 2 | 1 | 2008 |
| | | | XENYX X1622USB | | 1 | 2011 |
| 89 | Mobil Unit Penerangan Darat | 02.02.01.06.003 | Isuzu Elf / NKR 55 E 12 A | 1 | 1 | 2010 |
| 90 | Modem | 02.10.02.04.004 | DU-562M | 8 | 1 | 2007 |
| | | | su-8650u | | 1 | 2013 |
| | | | HUAWEI E353 | | 2 | 2014 |
| | | | Edimax / 150 Mbps | | 1 | 2014 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----|------|
| | | | wireless 3G Broadband Router | | | |
| | | | MINI BOLT HUAWEI | | 2 | 2015 |
| | | | PROLINK PHS301 | | 1 | 2015 |
| 91 | Modulation Monitor Speaker Kabaret | 02.06.01.01.035 | - | 23 | 2 | 2009 |
| | | | - | | 4 | 2009 |
| | | | Clarion | | 3 | 2010 |
| | | | - | | 4 | 2011 |
| | | | SONICGEAR HP800 | | 3 | 2012 |
| | | | Sennheiser / HD 201 | | 2 | 2014 |
| | | | K44 / K44 | | 3 | 2014 |
| | | | HEADPHONE DISTRIBUTORINPUT CHANNEL 2X STEREO | | 2 | 2019 |
| 92 | Monitor | 02.10.02.03.002 | Samsung | 1 | 1 | 2020 |
| 93 | Note Book | 02.10.01.02.003 | Dell XPS 330 | 45 | 1 | 2008 |
| | | | Dell XPS 330 | | 2 | 2008 |
| | | | Dell XPS 330 | | 2 | 2008 |
| | | | Dell XPS 330 | | 1 | 2008 |
| | | | Dell | | 2 | 2009 |
| | | | Acer Aspire | | 3 | 2012 |
| | | | lenovo | | 2 | 2013 |
| | | | Hewlett Packard/ ENVY M6 1113 | | 3 | 2013 |
| | | | Lenovo/2410-0663 | | 1 | 2013 |
| | | | ASUS VIVOBOK / S551LB-CJ207H | | 8 | 2014 |
| | | | HP PAVILION | | 13 | 2015 |
| | | | ASUS / ZENPAD Z380KL | | 4 | 2016 |
| | | | MACBOOK PRO | | 1 | 2020 |
| | | | YOGA | | 1 | 2020 |
| Yoga Slim7i Carbon | 1 | 2020 | | | | |
| 94 | P.C Unit | 02.10.01.02.001 | Dell | 66 | 5 | 2007 |
| | | | - | | 1 | 2008 |
| | | | Dell Vostro 220 | | 2 | 2009 |
| | | | Apple imac MB418ZP/A | | 1 | 2009 |
| | | | HP Pavilion Slimline 5389d | | 3 | 2010 |
| | | | - | | 1 | 2010 |
| | | | - | | 2 | 2011 |
| | | | Dell Inspiron One AIO 23" | | 6 | 2011 |
| | | | - | | 1 | 2011 |
| | | | - | | 1 | 2011 |
| | | | HP Presario CQ3621D | | 1 | 2011 |
| | | | ALL IN ONE PC | | 6 | 2012 |
| | | | HP | | 3 | 2013 |
| | | | - | | 6 | 2013 |
| | | | HP PAVILION / ALL IN ONE 23-B220L | | 5 | 2014 |
| | | | intel / Intel D34010WYKH | | 6 | 2014 |
| | | | HP DESKTOP | | 6 | 2015 |
| | | | HP / 20-R123D | | 2 | 2016 |
| | | | HP ALL IN ONE 24 , G251D OFFICEHOME BUSSINESS | | 2 | 2017 |
| | | | HP ALL IN ONE PAVILION TOUCHMART 27274D | | 1 | 2017 |
| | | | LENOVO ALL INONE AIO520S-23IKU | | 1 | 2017 |
| NIKON D5500 VR KIT | 1 | 2017 | | | | |
| ASUS PRO S340MC-i5 8400059T | 3 | 2019 | | | | |
| 95 | Papan Nama Instansi | 02.05.01.05.076 | - | 4 | 1 | 2008 |
| | | | Neon Box | | 1 | 2012 |
| | | | - | | 1 | 2014 |
| | | | - | | 1 | 2016 |
| 96 | Papan Visual/Papan Nama | 02.05.01.05.003 | RUNNING TEXT | 1 | 1 | 2017 |
| 97 | Partisi | 02.05.02.01.041 | - | 1 | 1 | 2010 |
| 98 | peralatan antena vhf/fm lainnya (dst) | 02.06.03.08.004 | Model OMB | 151 | 2 | 2010 |
| | | | - | | 80 | 2010 |
| | | | Canare | | 1 | 2010 |
| | | | - | | 2 | 2011 |
| | | | - | | 2 | 2011 |
| | | | - | | 6 | 2011 |
| | | | - | | 30 | 2011 |
| | | | Sierra | | 1 | 2011 |
| | | | - | | 1 | 2011 |

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------------|--------------------------------|------|------|
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | L-2T2S | 1 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 3 | 2012 |
| | | | - | 4 | 2012 |
| | | | - | 1 | 2012 |
| | | | - | 1 | 2012 |
| | | | - | 1 | 2012 |
| | | | - | 1 | 2012 |
| | | | GENERIC | 2 | 2016 |
| | | | GENERIC | 2 | 2016 |
| | | | SOLAR TOP | 2 | 2016 |
| | | | - | 3 | 2008 |
| | | | - | 3 | 2008 |
| | | | - | 3 | 2008 |
| | | | - | 3 | 2008 |
| | | | - | 4 | 2008 |
| | | | - | 10 | 2008 |
| | | | - | 40 | 2008 |
| | | | - | 40 | 2008 |
| | | | - | 40 | 2008 |
| | | | - | 40 | 2008 |
| | | | - | 1 | 2008 |
| | | | - | 20 | 2009 |
| | | | - | 2 | 2011 |
| | | | - | 1 | 2011 |
| | | | - | 2 | 2012 |
| | | | APC 19" Closed 42U | 1 | 2012 |
| | | | - | 1 | 2012 |
| | | | ATEN | 2 | 2013 |
| | | | D-link | 4 | 2013 |
| | | | AMP | 5 | 2013 |
| | | | airmax | 6 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 6 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 6 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 6 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 6 | 2013 |
| | | | rocket m2 | 8 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 8 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 10 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 10 | 2013 |
| | | | Foscam | 14 | 2013 |
| | | | Omni | 14 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 21 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 30 | 2013 |
| | | | The AMP NETCONNECT | 1 | 2013 |
| | | | Engenius | 1 | 2013 |
| | | | OpenVox A800E | 1 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 1 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 1 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 1 | 2013 |
| | | | ubiquiti | 1 | 2013 |
| | | | Watch Guard XTM 870 | 1 | 2013 |
| | | | nirax | 1 | 2013 |
| | | | ATEN / CS1316 | 2 | 2014 |
| | | | TP-LINK MC210CS | 2 | 2014 |
| | | | Brother, Tze-631 | 2 | 2014 |
| | | | NWC / FDF Rack Mounted 48 Core | 2 | 2014 |
| | | | - | 5 | 2014 |
| | | | Netviel, / NVL-DPSM-SC-SC-01 | 6 | 2014 |
| | | | Netviel, / NVL-DPSM-ST-LC-01 | 6 | 2014 |
| 99 | Peralatan Jaringan lainnya | 02.10.02.04.033 | | 4852 | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------------|--|----|-------|------|
| | | | grandstream / gxv3672hd | | 10 | 2014 |
| | | | belden / connector cat 6 | | 12 | 2014 |
| | | | - | | 14 | 2014 |
| | | | Netviel / Inline Joint Closure 24 Core | | 14 | 2014 |
| | | | UBIQUITI airCam | | 14 | 2014 |
| | | | Netviel Patch Cord 1 Meter SC-CC | | 22 | 2014 |
| | | | Nirax / NRW 5008C | | 22 | 2014 |
| | | | NWC / FDF Rack Mounted 12 Core | | 22 | 2014 |
| | | | TP-LINK JetStream 24-Port / TL-SG3424 P Jetstream | | 22 | 2014 |
| | | | Netviel Patch Cord 1 Meter / SC-LC | | 22 | 2014 |
| | | | - | | 23 | 2014 |
| | | | TP-LINK MC210CS | | 28 | 2014 |
| | | | TP-LINK TL-SM311LS | | 28 | 2014 |
| | | | - | | 44 | 2014 |
| | | | - | | 78 | 2014 |
| | | | Voxel Kabel Optik Single mode 12 core / G.625D | | 1.600 | 2014 |
| | | | Voxel / G.625D | | 2.150 | 2014 |
| | | | xorcom / xv3000 | | 1 | 2014 |
| | | | belden / utp cat 6 | | 1 | 2014 |
| | | | - | | 2 | 2015 |
| | | | - | | 3 | 2015 |
| | | | AMP NETCONNECT | | 6 | 2015 |
| | | | BELDEN | | 6 | 2015 |
| | | | APC | | 10 | 2015 |
| | | | - | | 1 | 2015 |
| | | | UBIQUITI / UNIFI VC-NCR | | 3 | 2016 |
| | | | OMI524 | | 12 | 2016 |
| | | | ERICSON | | 200 | 2016 |
| | | | TP-LINK / SFP MODULE TL-SM311LS | | 4 | 2018 |
| | | | GENERIK / PATCH CORD FO SC TO LC DUFLEX SM 3M | | 10 | 2018 |
| | | | GENERIK / PATCH CORD FO SC TO SC DUFLEX SM 3M | | 10 | 2018 |
| | | | FUJIKURA / SINGLE FIBER FUSION SPLICER 70S+ | | 1 | 2018 |
| | | | Tiang Telpon | | 4 | 2019 |
| | | | SANGFOR INTERNET ACCES MANAGEMENT | | 1 | 2019 |
| | | | Kabel FO Udara OTB 96 Core | | 1 | 2019 |
| | | | 14 M | | 14 | 2020 |
| | | | NEXT Generation FIREWALL NGAF56 | | 1 | 2020 |
| | | | KABEL FO | | 1 | 2020 |
| | | | UNIFI | | 1 | 2020 |
| | | | Instalasi Jaringan radio Komunikasi Hotel Bumi Asi | | 1 | 2020 |
| | | | Instalasi Jaringan radio Komunikasi Rumah Sakit Um | | 1 | 2020 |
| | | | Instalasi Jaringan radio Komunikasi DKPUS Pemprov. | | 1 | 2020 |
| | | | Instalasi Jaringan radio Komunikasi Dinas kehutana | | 1 | 2020 |
| | | | TP-LINK | | 1 | 2013 |
| | | | - | | 2 | 2015 |
| | | | TP-LINK | | 10 | 2015 |
| | | | SWITCH EDGE CORE | | 1 | 2015 |
| | | | QLOGIC | | 1 | 2015 |
| | | | cisco | | 1 | 2017 |
| | | | Primary Sistem - Edgcore | | 1 | 2019 |
| | | | TP-LINK T 2600G-18TS | | 5 | 2020 |
| | | | TP-Link | | 10 | 2020 |
| 100 | peralatan mainframe lainnya (dst) | 02.10.02.01.018 | - | 11 | 1 | 2009 |
| | | | BLUE Print 285A | | 3 | 2012 |
| | | | MyPBX | | 1 | 2013 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|--|----|----|------|
| | | | Logitech MK220 | | 6 | 2014 |
| 101 | peralatan microwave f p u lainnya (dst) | 02.06.03.15.004 | - | 1 | 1 | 2012 |
| 102 | Peralatan Minikomputer lainnya | 02.10.02.02.017 | - | 9 | 1 | 2009 |
| | | | APACER AH-350 / FLASHDISK 32GB USB 3.0 | | 8 | 2014 |
| 103 | peralatan pemancar vhf/fm lainnya (dst) | 02.06.03.03.004 | sony ic recorder | 3 | 2 | 2013 |
| | | | Kretz | | 1 | 2013 |
| 104 | Peralatan Personal Komputer lainnya | 02.10.02.03.018 | - | 47 | 4 | 2009 |
| | | | - | | 1 | 2009 |
| | | | Logitech Quikcam | | 6 | 2010 |
| | | | TP Link | | 2 | 2012 |
| | | | Logitech 325 | | 3 | 2012 |
| | | | - | | 1 | 2012 |
| | | | - | | 2 | 2013 |
| | | | LOGITECH MK220 | | 8 | 2014 |
| | | | ICA CT682B | | 3 | 2015 |
| | | | ICA / CS1238 | | 4 | 2016 |
| | | | SAMSUNG SUPERMICRO | | 10 | 2017 |
| | | | - | | 1 | 2017 |
| | | | UPS System SCALA Power dan Electrical System - Supreme | | 1 | 2019 |
| | | | - | | 1 | 2019 |
| 105 | peralatan studio audio lainnya (dst) | 02.06.01.01.096 | - | 12 | 1 | 2010 |
| | | | DVR-08B | | 1 | 2011 |
| | | | Sony LCD-PX312M | | 2 | 2012 |
| | | | - | | 1 | 2012 |
| | | | JVC GZ E10 | | 1 | 2012 |
| | | | Sony LCD-PX312M | | 1 | 2012 |
| | | | glasswoold lapis karpet | | 1 | 2014 |
| | | | Behringer / Xenyx1202 Fx | | 1 | 2014 |
| | | | Toyo / Neutrik Speaken | | 1 | 2014 |
| SONY DIGITAL VOICE RECORDER | 2 | 2019 | | | | |
| 106 | Pesawat Telephone | 02.06.02.01.003 | Panasonic | 4 | 4 | 2013 |
| 107 | Pick Up | 02.02.01.03.002 | TOYOTA / HILUX PICK UP 2 OL MT | 1 | 1 | 2014 |
| 108 | Portable Generating Set | 02.01.03.04.002 | Honda Exell | 3 | 1 | 2007 |
| | | | ENGINE | | 1 | 2015 |
| | | | AGG POWER DIESEL GENSET POWERED BY PERKINS | | 1 | 2019 |
| 109 | Power Amplifier | 02.06.01.01.059 | A3KW | 1 | 1 | 2017 |
| 110 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film) | 02.06.01.02.038 | - | 3 | 1 | 2008 |
| | | | YOMIKO | | 2 | 2016 |
| 111 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 02.10.02.03.003 | HP 6180 all in one | 52 | 1 | 2007 |
| | | | epson Lx 300 | | 1 | 2008 |
| | | | Epson Stylus TX | | 1 | 2008 |
| | | | Epson Stylus CX | | 1 | 2008 |
| | | | HP P1006 | | 1 | 2008 |
| | | | HP P1006 | | 1 | 2009 |
| | | | Epson LX 300 | | 1 | 2009 |
| | | | HP Laserjet Pro P1102 | | 3 | 2010 |
| | | | Canon MP258 Inkjet Multifuncion | | 2 | 2011 |
| | | | Epson LX-300 +II | | 1 | 2011 |
| | | | - | | 2 | 2012 |
| | | | Hp LaserJet Pro P1102 | | 3 | 2012 |
| | | | canon pixma ip2770 | | 2 | 2013 |
| | | | HP Laserjet M 1132 MIT | | 3 | 2013 |
| | | | EPSON | | 1 | 2013 |
| | | | HP Laserjet Pro P1606dn | | 1 | 2013 |
| | | | Epson/L110 | | 1 | 2013 |
| | | | epson lx310 | | 1 | 2013 |
| | | | EPSON / L-350 | | 4 | 2014 |
| | | | HP / M1132MFP | | 5 | 2014 |
| | | | Epson / L350 | | 1 | 2014 |
| | | | Epson / L300 | | 1 | 2014 |
| | | | CANON MX397 | | 2 | 2015 |
| EPSON L565 | 1 | 2015 | | | | |
| EPSON / L220 | 2 | 2016 | | | | |
| epson l360-inkjet | 2 | 2017 | | | | |
| EPSON L380 | 3 | 2017 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---|----|----|------|
| | | | EPSON L655 | | 1 | 2017 |
| | | | UPLOADER T-SOLUTION | | 1 | 2017 |
| | | | EPSON / L565 | | 1 | 2018 |
| | | | EPSON PRINTER INKJET COLOR ECO TANK L6190 [L6190] | | 1 | 2020 |
| 112 | Radio | 02.05.02.06.001 | Polytron psc 130 - 11j900278 | 4 | 1 | 2011 |
| | | | Polytron psc 130 - 11j900278 | | 2 | 2011 |
| | | | Sherwood / TX5505 | | 1 | 2014 |
| 113 | Rak Besi | 02.05.01.04.003 | astrobox | 57 | 2 | 2008 |
| | | | VIP | | 15 | 2008 |
| | | | Emerson | | 2 | 2013 |
| | | | Nirax | | 14 | 2013 |
| | | | APC-AR3100 NetShelter SX42U | | 2 | 2014 |
| | | | Nirax Wallmount Rack 8U | | 14 | 2014 |
| | | | NIRAX | | 5 | 2015 |
| | | | - | | 2 | 2016 |
| | | | System Cable Data DTC Premium Cabinet | | 1 | 2019 |
| 114 | Rak Kayu | 02.05.01.04.004 | - | 5 | 1 | 2008 |
| | | | - | | 1 | 2013 |
| | | | - | | 1 | 2013 |
| | | | - | | 1 | 2013 |
| | | | - | | 1 | 2013 |
| 115 | Rak Peralatan | 02.06.01.02.042 | Krack K06 | 1 | 1 | 2010 |
| 116 | Router | 02.10.02.04.002 | RB493AH | 75 | 1 | 2011 |
| | | | Mikrotik | | 14 | 2013 |
| | | | Ubiquiti edgerouter LITE | | 14 | 2014 |
| | | | Unifi AP outdoor+ 2,4GHz | | 28 | 2014 |
| | | | mikrobits / dinara MBDIN-V2-L6 | | 1 | 2014 |
| | | | D-LINK | | 2 | 2015 |
| | | | MIKROTIK | | 2 | 2015 |
| | | | ROUTER MIKROTIK/MIKROBITS DINARA | | 1 | 2015 |
| | | | MIKROTIK | | 12 | 2016 |
| 117 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 02.10.02.03.004 | HP Scanjet G3010 | 1 | 1 | 2007 |
| 118 | Self Supporting Tower | 02.06.03.20.001 | - | 1 | 1 | 2011 |
| 119 | Sepeda Motor | 02.02.01.04.001 | yamaha / 3C1 | 2 | 1 | 2008 |
| | | | Yamaha / force sporty warna biru | | 1 | 2014 |
| 120 | Server | 02.10.02.04.001 | HP Proliant | 12 | 1 | 2008 |
| | | | HP Proliant DL 380G7 X5650 | | 2 | 2012 |
| | | | IBM SYTEM X3650M4 | | 4 | 2013 |
| | | | SERVER SUPER MICRO | | 4 | 2015 |
| | | | Server Data Center 43211501-PKM-004807850 | | 1 | 2020 |
| 121 | Sofa | 02.05.02.01.048 | - | 1 | 1 | 2008 |
| 122 | Speaker Komputer | 02.10.02.02.016 | Simbadda CST 66 | 3 | 3 | 2010 |
| 123 | Stabilisator | 02.05.02.06.020 | Stavol | 1 | 1 | 2007 |
| 124 | switcher/menara antena lainnya (dst) | 02.06.03.20.005 | - | 42 | 40 | 2008 |
| | | | - | | 1 | 2008 |
| | | | - | | 1 | 2012 |
| 125 | Tabung Gas | 02.05.02.05.009 | - | 1 | 1 | 2014 |
| 126 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 01.01.01.04.001 | - | 1 | 1 | 2004 |
| 127 | Tangga Aluminium | 02.05.02.06.036 | - | 4 | 1 | 2007 |
| | | | TALUX / 8M | | 1 | 2016 |
| | | | elescopic Ladder | | 2 | 2020 |
| 128 | Telephone (PABX) | 02.06.02.01.001 | grandstream / gxv3140 | 63 | 42 | 2014 |
| | | | Cisco / WS-X4548-GB-RJ45 | | 1 | 2014 |
| | | | Yealink, EXP-39 | | 1 | 2014 |
| | | | YEALINK | | 19 | 2015 |
| 129 | Telephone Hybrid | 02.06.01.01.022 | Single Line | 3 | 1 | 2010 |
| | | | Single Line | | 1 | 2011 |
| | | | YEALINK | | 1 | 2015 |
| 130 | Telephone Mobile | 02.06.02.01.004 | ANDROMAX B SE | 1 | 1 | 2017 |
| 131 | Televisi | 02.05.02.06.002 | Toshiba Regza | 9 | 3 | 2008 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------|--|-----|----|------|
| | | | LG 19LH20 19" | | 1 | 2010 |
| | | | Toshiba / Type PBI E Lcd, Plus Bracket TV LCD/ M | | 2 | 2011 |
| | | | sharp | | 2 | 2013 |
| | | | SAMSUNG 55 | | 1 | 2017 |
| 132 | Tiang Bendera | 02.05.02.06.032 | - | 1 | 1 | 2016 |
| 133 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 02.06.01.01.048 | Prolink Pro 1200 VA | 63 | 1 | 2007 |
| | | | APC UPS VA RS 1500 | | 2 | 2010 |
| | | | Prolink Pro 1200S | | 6 | 2010 |
| | | | Prolink Pro 700 | | 7 | 2010 |
| | | | Montero | | 2 | 2011 |
| | | | CE 1200 | | 2 | 2012 |
| | | | APC Smart -UPS RT | | 1 | 2012 |
| | | | APC | | 3 | 2013 |
| | | | APC / BX1100CI | | 5 | 2014 |
| | | | APC | | 33 | 2015 |
| | | | - | | 1 | 2015 |
| 134 | Unit Pemancar VHF/FM Stationary | 02.06.03.03.003 | RVR TEX30LCD | 2 | 1 | 2010 |
| | | | Exitter | | 1 | 2011 |
| 135 | Unit Power Supply | 02.05.02.06.018 | APC BR550 GI | 33 | 1 | 2013 |
| | | | APC | | 2 | 2013 |
| | | | Vesta Smart Line Interactive | | 14 | 2013 |
| | | | UPS/Stabilizer 10000VA, APC SURT10000XLI / - Smart-UPS RT XL | | 2 | 2014 |
| | | | APC BE525-AS Back - UPS ES | | 14 | 2014 |
| 136 | White Board | 02.05.01.05.005 | sakura | 3 | 1 | 2008 |
| | | | - | | 1 | 2011 |
| | | | sakana | | 1 | 2013 |
| 137 | Wireless | 02.05.02.06.012 | Polytron GV 802 | 3 | 1 | 2007 |
| | | | - | | 2 | 2008 |
| 138 | Wireless Access Point | 02.10.02.04.023 | linksys | 186 | 1 | 2008 |
| | | | - | | 3 | 2008 |
| | | | - | | 40 | 2008 |
| | | | UBIQUITI | | 10 | 2015 |
| | | | UBIQUITI / UNIFI AP-AC PRO | | 70 | 2016 |
| | | | UBIQUITI UNIFI AP-AC PRO | | 10 | 2017 |
| | | | UBIQUITI / POWERBEAM 5AC-GEN2 | | 2 | 2018 |
| | | | D-LINK / DIR-895L ULTRA WIFI ROUTER | | 3 | 2018 |
| | | | UBIQUITI / LITEBEAM SECTORAL 5AC 16 120 | | 4 | 2018 |
| | | | UBIQUITI / LITEBEAM SECTORAL 5AC GEN2 | | 10 | 2018 |
| | | | UBIQUITI / UNIFI AP-AC PRO | | 13 | 2018 |
| | | | UBIQUITI / UNIFI AP-AC PRO | | 20 | 2018 |
| 139 | Wireless Amplifier | 02.06.02.06.002 | KREZT/9903 | 1 | 1 | 2015 |

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambaran kinerja Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022 diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) s.d. triwulan II 2022 , Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

TABEL 2.5.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | Program/Kegiatan/SubKegiatan | Indikator Kinerja Outcome/Output | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|----|--|---|---|-----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan pelayanankesekretarian | 100% | 100% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | | | 100% | 100% | 100% | | |
| | | Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah | 3 | 3 | 4 | | | 3 | 3 | 4 | | | 100 | 100 | 100 | | |
| | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (orang) | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 44 orang | | | | | | | |
| | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (orang) | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 53 orang | 44 orang | | | | | | | |
| | Peningkatan Disiplin Aparatur | Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat disiplinnya | 12 bulan | - | - | | | 53 orang | - | - | | | | | | | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (orang) | 200 orang | 200 orang | 2 orang | | | | 7 PNS | 2 orang | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----|----|-----------|-----------|-----------|-----|--|--|--|--|--|
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen) | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | | | | | | |
| | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (laporan) | 5 laporan | - | 5 laporan | | | 5 Laporan | - | 5 laporan | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Nilai Sakip PD | | | | 78 | 80 | | | | 78 | | | | | |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 12 | 12 | | | | 12 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan (dokumen)</i> | | | | 5 | 5 | | | | 5 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah dokumen Evaluasi kinerja PD (dokumen laporan)</i> | | | | 7 | 7 | | | | 7 | | | | | |
| | | Survey kepuasan pelayanan internal PD | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan /Dokumen Dokumen Gaji dan Tunjangan Keuangan PD | | | | 52 | | | | | 52 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan</i> | <i>jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan</i> | | | | 55 | 60 | | | | 55 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-----------|---|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| | ASN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah pengelola administrasi keuangan yang bekerja | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun | | | | 1 | 5 | | | | 1 | | | | | | |
| | | Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah berkas kegiatan administrasi kepegawaian PD | | | | 16 | | | | | 0 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah uploader mesin absensi yang diadakan | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai ASN yang ikut pendidikan dan pelatihan formal | | | | 0 | 8 | | | | 0 | | | | | | |

| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah laporan kegiatan administrasi Umum PD | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia | | | | 25 | 1 | | | | 25 | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | | | | 5 | 20 | | | | 5 | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia | | | | 8 | 6 | | | | 8 | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak | | | | 250 | 5000 | | | | 246 | | | | | | |
| | Jumlah barang cetak digital printing (meter) | | | | | 160 | | | | | | | | | | |
| | Jumlah penggandaan | | | | 6,000 | | | | | 597 8 | | | | | | |
| | Jumlah penjilidan | | | | 25 | | | | | 25 | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia | | | | 1,200 | 12 bulan | | | | 119 0 | | | | | | |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah makan dan minum tamu yang tersedia (pax) | | | | 1,000 | 1000 | | | | 447 | | | | | | |
| | Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia | | | | 428 | 700 | | | | 398 | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan (kali) | | | | 60 | 60 | | | | 60 | | | | | | |
| | Jumlah koordinasi dan konsultasi Luar daerah yang dilaksanakan (kali) | | | | 80 | 9 | | | | 80 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|----------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang diadakan | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</i> | <i>Jumlah mebelair yang diadakan</i> | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> | <i>Laptop</i> | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Berkas Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 24 | | | | | 24 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i> | <i>Jumlah laporan surat yang dikirim</i> | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | |
| | | <i>Jumlah Materai yang tersedia (lembar)</i> | | | | | 700 | | | | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Surat yang dikirim</i> | | | | | 12 bulan | | | | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i> | <i>Jumlah bulan Tagihan berkas laporan rekening listrik, air telepon/fax, tv kabel, virtual meeting, Bandwith yang dibayarkan</i> | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | |
| | | <i>Jumlah bulan tagihan rekening listrik, air, telepon/fax, tv kabel</i> | | | | | 12 | | | | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | <i>Jumlah berkas laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i> | | | | 12 | | | | | 12 | | | | | |
| | | <i>Jumlah Pegawai tidak tetap yang terlayani</i> | | | | | 37 | | | | | | | | | |

| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan BMD yang dipelihara | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah laporan Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang dipelihara | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara (unit) | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Jumlah laporan peralatan dan mesin Kantor yang terpelihara | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | |
| | | Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara (jenis) | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah laporan Gedung Kantor yang terpelihara | | | 12 | | | | | 12 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-----|--|--|---|-----|---|--|--|--|--|--|
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah BBM genset | | | 483 | | | | 480 | | | | | | |
| | | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara | | | 15 | | | | 15 | | | | | | |
| | Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik | Rasio informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun () | | | 0 | | | | - | | | | | | |
| | | - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun (Jenis) | | | 5 | | | | - | | | | | | |
| | | Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi () | | | 0 | | | | - | | | | | | |
| | | - jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan (Jenis) | | | 13 | | | | - | | | | | | |
| | | Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil () | | | 0 | | | | - | | | | | | |
| | Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah | Jumlah saluran komunikasi yang dikelola | 10 saluran | 10 saluran | - | | | ? | - | | | | | | |
| | | Jumlah Saluran Komunikasi Pemda yang dikelola (saluran) | - | - | 1 | | | - | - | 1 | | | | | |
| | | Jumlah Saluran Komunikasi Non Pemda yang difasilitasi (saluran) | - | - | 7 | | | - | - | 7 | | | | | |
| | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah data/informasi pemerintah daerah | 400 informasi perbulan, 2 pertemuan kegiatan, 2 pameran | 1.200 berita/informasi, pameran 2 kegiatan,, penerbitan | - | | | 840 informasi, 1 pameran kegiatan, 2 pertemuan kegiatan | ? | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|--|-------|--|--|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | an kegiatan | majalah 2 kali, penerbitan informasi di berbagai media sebanyak 150 kali | | | | an | | | | | | | | |
| | | Jumlah berita/informasi pemda yang dipublikasikan (berita/informasi) | - | - | 76608 | | | | - | 77,404 | | | | | | |
| | Pengelolaan Kemitraan | Jumlah mitra yang terfasilitasi | 60 kemitraan | 50 kemitraan, 4 kali pertemuan, 2 kali rakor, 1 kali pameran, pembe ntukan kampung radio | - | | | 50 kemitraan | ? | - | | | | | | |
| | | Jumlah Mitra yang bersinergi dengan Pemda (media lokal) | - | - | 30 | | | - | - | 28 | | | | | | |
| | | Jumlah mitra yg bersinergi dengan pemda (Media nasional) | - | - | 10 | | | - | - | 11 | | | | | | |
| | Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah | Jumah Opini Publik dan Aspirasi Publik | - | 100 opini/a pirasi publik, 1 kali pertemuan, 1 kali bimtek | 0 | | | | ? | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------|--|--|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| | | Jumlah Pengelola Aspirasi publik lingkup pemerintah daerah Yang Difasilitasi (orang) | - | - | | | | | - | | | | | | | |
| | | Jumlah Aspirasi publik yang dilaporkan (buku/laporan) | - | - | 0 | | | | - | - | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase kesesuaian informasi publik terhadap kebijakan/program daerah yang dapat diakses masyarakat | | | 95 | | | | | 95 | | | | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Penyampaian Informasi Program/kegiatan melalui semua media komunikasi | | | 60 | | | | | 60 | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i> | <i>Jumlah konten yang dimutakhirkan dan dikembangkan.</i> | | | 236 | | | | | 231 | | | | | | |
| | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i> | <i>Jumlah saluran komunikasi non Pemda yang difasilitasi</i> | | | 9 | | | | | 9 | | | | | | |
| | | <i>Jumlah saluran komunikasi pemda yang dikelola</i> | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik</i> | <i>Jumlah informasi dan Publikasi PD yang dikelola</i> | | | 34 | | | | | 34 | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Lembaga Informasi non struktural yang dikelola</i> | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i> | <i>Jumlah Informasi/data publik Pemda yang diupdate</i> | | | 12766 | | | | | 11840 | | | | | | |
| | | <i>Jumlah Mitra yang terfasilitasi serta Jumlah data/informasi publik pemda yang update</i> | | | 35 | | | | | 35 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|---|----|--|--|-------------------------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI | - Persentase peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi () | | | 0 | | | | | - | | | | | | | |
| | Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT (Ada) | | | 1 | | | | | - | | | | | | | |
| | Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi () | | | 0 | | | | | - | | | | | | | |
| | Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet (Jaringan) | | | 5 | | | | | - | | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi | Jumlah layanan infrastruktur dan teknologi | 1 paket colocation, 3 paket internet | 2 paket internet, 1 paket colocation, 1 paket data center | - | | | 12 bulan layanan | Pembayaran paket internet 12 bulan, pembayaran paket colocation 12 bulan, 5 lisensi firewall DC, | - | | | | | | | |
| | Jumlah layanan Infrastruktur dan teknologi (paket data center) | - | - | 1 | | | - | - | 1 | | | | | | | |
| | Jangka waktu layanan colocation (bulan) | - | - | 12 | | | - | - | 12 | | | | | | | |
| | Jangka waktu layanan paket internet (bulan) | - | - | 12 | | | - | - | 12 | | | | | | | |
| Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government | Kapasitas layanan publik dan pemerintah berbasis e-Government | 1 aplikasi layanan, 6 lisensi pendu | 1 Aplikasi Mobile, 5 Lisensi | - | | | 1 aplikasi layanan, 2 lisensi pendu | 2 aplikasi mobile, lisensi aplikasi | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|----|--|--|--------------------------------------|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | kung, 40 websit e | Aplika si | | | | kung, update 40 websit e | si, aplika si integra si, aplika si pendid ikan | | | | | | | | |
| | | Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government (lisensi aplikasi pendukung) | - | - | 5 | | | - | - | 5 | | | | | | | |
| | | Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government (aplikasi layanan) | - | - | 5 | | | - | - | 5 | | | | | | | |
| | | Kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government (website) | - | - | 40 | | | - | - | 40 | | | | | | | |
| | Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah | Kapasitas jaringan komunikasi data | 1 lisensi aplika si pendu kung, 6 interko neksi, 1 server | 20 radio acces s point, 10 radio point to point, 20 manag e switch, 20 SPF modul e | - | | | 8 interko neksi | Pema sanga n 4 Radio acces s, Pemb angun an tower mini, mainte nance 2 manag e switch, terlaks ananya pemeli haraa n jaringa n komun ikasi data. | - | | | | | | | |
| | | Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (interkoneksi) | - | - | 6 | | | - | - | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|----|----|--|---|--------------------------|----|----|--|--|--|--|--|
| | | Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (instalasi jaringan komunikasi) | - | - | 2 | | | - | - | 2 | | | | | | |
| | | Kapasitas Jaringan Komunikasi Data (peralatan jaringan komputer) | - | - | 10 | | | - | - | 10 | | | | | | |
| | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi | Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi (insiden) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | - | | | | | | |
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi | Jumlah kebijakan teknis di Bidang Keamanan Informasi (kebijakan) | - | 1 kebijakan, 3 SDM keamanan informasi, 40 peserta yang tersosialisasi perihal informasi security awareness | - | | | - | 7 SDM keamanan informasi | - | | | | | | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi dan kapasitas layanan publik pemerintah berbasis e-Government | | | | 90 | | | | | 90 | | | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase jumlah layanan publik pemerintah berbasis e-Government yang terlayani | | | | 60 | | | | | 60 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| | Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah Pendaftaran Nama Domain yang terlayani | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Interkoneksi jaringan internet OPD | | | | 32 | | | | | 10 | | | | | |
| | Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | persentase Jumlah layanan Infrastruktur teknologi berbasis E-Government | | | | 20 | | | | | 32 | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah layanan Infrastruktur dan Teknologi | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | |
| | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah layanan penyediaan data dan Teknologi informasi yang berkualitas | | | | 5 | | | | | 0 | | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN | Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi (%) | | | | 40 | | | | | - | | | | | |
| | | Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun () | | | | 0 | | | | | - | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|----------------------|-----|--|--|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel (%) | | | 100 | | | | | - | | | | | | |
| | Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard | | | - | | | | | | - | | | | | | |
| | Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah | Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah (kelompok parameter) | 8 kelompok parameter | 8 kelompok parameter | 0 | | | 8 kelompok parameter | Kompilasi buku statistik Diskminfo (cetak 50 buku), 8 kelompok parameter | - | | | | | | |
| | | Rapat Teknis dalam rangka Kompilasi Data Sektoral dari OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung (kali) | - | - | 5 | | | - | - | - | | | | | | |
| | Pengembangan Satu Data/ One Data | Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam pengembangannya satu data daerah ditingkat Prov. Kep. Babel (orang) | - | - | 0 | | | - | - | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------------|------------------------------|---|-----|--|----------------------------|--|---|-----|--|--|--|--|--|
| | Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten | 20 kali layanan interaktif | 20 layanan, 1 kali festival | - | | | 20 kali layanan interaktif | 20 layanan, 1 kali festival TIK Nasional | - | | | | | | |
| | | Jumlah pemberdayaan TIK yang diperoleh masyarakat (kali) | - | - | 5 | | | - | - | 5 | | | | | | |
| | Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian | Jumlah layanan persandian yang bisa dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (layanan) | 4 layanan | - | 2 | | | 3 layanan | - | 2 | | | | | | |
| | | Pengembangan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan data/informasi/statistik daerah | - | Jumlah buku statistik daerah | - | | | - | Buku DDA dalam angka PDRB 200 buku | - | | | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Data dan informasi statistik yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan | | | | 75 | | | | | 75 | | | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi | Persentase kebutuhan Data Statistik Sektoral Daerah Provinsi dan Diskominfo Kabupaten/Kota | | | | 70 | | | | | 70 | | | | | |
| | <i>SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i> | <i>1. Jumlah kebutuhan data Statistik Sektoral Daerah (OPD); 2. jumlah kompilasi statistik sektoral</i> | | | | 300 | | | | | 300 | | | | | |
| | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | |
| | <i>SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral</i> | <i>Jumlah laporan Metadata Statistik Sektoral Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung;</i> | | | | 20 | | | | | 15 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI) | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | |
| | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah | | | | 70 | | | | | 55 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</i> | <i>Sertifikat ISO 27001 dan PERGUB</i> | | | | 3 | | | | | 0 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i> | <i>jumlah OPD yg telah mererapkan penilaian mandiri penerapan sistem manajemen pengaman informasi</i> | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i> | <i>Tersedianya layanan keamanan informasi untuk Pemda</i> | | | | 4 | | | | | 4 | | | | | |
| | | <i>Tersedianya SDM keamanan informasi</i> | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|
| | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi | Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi | | | | 85 | | | | | 85 | | | | | | |
| | <i>Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi</i> | <i>Jumlah Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi yang memanfaatkan Webmail Sanapati</i> | | | | 34 | | | | | 34 | | | | | | |

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Bangka Belitung

| Uraian | Anggaran pada tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada tahun ke- | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| PENDAPATAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pendapatan Asli Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dana Perimbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA DAERAH | 10,982,773,268 | 17,421,346,215 | 14,929,520,001 | 25,433,457,142 | 17,737,530,532 | 10,276,276,761 | 15,378,053,541 | 14,591,125,650 | 23,710,856,719 | - | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah | 4,122,392,161 | 3,407,495,950 | 2,451,626,026 | | | 3,813,483,160 | 3,102,069,556 | 2,350,722,007 | | | 86.71% | 87.82% | 90.31% | 85.63% | 96.53% | 30.73% | 34.83% |
| Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,556,539,114 | 2,894,395,950 | 2,205,832,226 | | | 1,403,061,463 | 2,801,722,056 | 2,110,558,507 | | | 85.40% | 75.18% | 0 | 96.60% | 0 | 335.45% | 457.41% |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 2,066,353,047 | 307,450,000 | 91,531,300 | | | 2,016,921,000 | 230,272,500 | 88,956,000 | | | 88.65% | 88.36% | 82.56% | 90.39% | 95.05% | 20.41% | 22.56% |
| Peningkatan Disiplin Aparatur | 90,600,000 | | - | | | 81,900,000 | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 324,850,000 | 172,500,000 | 8,669,000 | | | 238,270,097 | 38,875,000 | 8,669,000 | | | 90.43% | 0 | 93.81% | 97.17% | 82.30% | -6.81% | -6.74% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 26,700,000 | 33,150,000 | 114,611,500 | | | 20,770,000 | 31,200,000 | 112,431,500 | | | 71.74% | 0 | 87.29% | 81.57% | 94.38% | 413.35% | 501.97% |
| Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 57,350,000 | - | 30,982,000 | | | 52,560,600 | - | 30,107,000 | | | 97.63% | 92.93% | 0 | 0 | 0 | -1.65% | 108.44% |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 12,247,533,543 | 9,610,201,198 | | | 11,320,876,968 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 98,743,861 | 75,710,858 | | | 91,035,800 | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 53,927,695 | 39,949,366 | | | 48,436,000 | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 44,816,166 | 35,761,492 | | | 42,599,800 | | | | | | | | | |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 7,760,441,858 | 6,953,828,674 | | | 7,101,737,907 | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 7,642,413,470 | 6,951,828,744 | | | 7,016,231,657 | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 86,800,000 | | | | 54,700,000 | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 28,850,000 | | | | 28,546,250 | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD | | | | 2,378,388 | 1,999,930 | | | 2,260,000 | | | | | | | | | |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | - | 40,000,000 | | | - | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | - | | | | - | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | - | 40,000,000 | | | | | - | | | | | | | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 310,930,729 | 277,688,645 | | | | | 300,472,397 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | 9,957,092 | 9,045,779 | | | | | 9,150,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 39,803,780 | 48,370,978 | | | | | 39,674,547 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 43,599,427 | 44,995,846 | | | | | 42,026,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | 20,482,430 | 24,989,042 | | | | | 20,339,500 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | 40,150,000 | 14,124,000 | | | | | 35,134,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | 10,015,000 | 15,750,000 | | | | | 9,405,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 146,923,000 | 120,413,000 | | | | | 144,743,350 | | | | | | | |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | 60,000,000 | - | | | | | 59,906,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | | | | - | | | | | | - | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | 60,000,000 | | | | | | 59,906,000 | | | | | | | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 3,763,158,000 | 1,900,388,170 | | | | | 3,607,282,310 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 10,858,000 | 8,196,000 | | | | | 6,004,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | 2,357,400,000 | 459,592,170 | | | | | 2,220,878,310 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | 1,394,900,000 | 1,432,600,000 | | | | | 1,380,400,000 | | | | | | | |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 254,259,095 | 362,584,851 | | | | | 160,442,554 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | 100,514,900 | | | | | 56,845,714 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | 115,209,547 | | | | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | | | | 32,146,845 | 59,970,000 | | | | 24,111,000 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 56,550,000 | 99,996,000 | | | | 36,668,840 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | 65,047,350 | Rp 87,409,304 | | | | 42,817,000 | | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 3,029,205,000 | 5,858,380,000 | 7,719,104,078 | | | 2,862,346,336 | 5,020,327,792 | 7,650,733,559 | | | | | | | | |
| Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah | 1,534,780,000 | 1,252,380,000 | 597,417,700 | | | 1,465,305,926 | 1,112,940,647 | 559,750,341 | | | | | | | | |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | 1,034,400,000 | 1,228,000,000 | 7,021,686,378 | | | 994,735,794 | 1,136,199,305 | 6,992,300,135 | | | | | | | | |
| Pengelolaan Kemitraan | 460,025,000 | 3,318,150,000 | 100,000,000 | | | 402,304,616 | 2,711,387,840 | 98,683,083 | | | | | | | | |
| Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah | - | 59,850,000 | | | | - | 59,800,000 | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | | | 10,307,950,084 | 4,495,909,523 | | | 9,937,988,589 | | | | | | | | |
| Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 10,307,950,084 | 4,495,909,523 | | | 9,937,988,589 | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | 5,805,138,290 | 2,192,195,523 | | | 5,583,637,288 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 529,165,568 | 442,200,000 | | | | 458,408,388 | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | | | | 1,628,466,991 | 1,661,514,000 | | | | 1,585,045,067 | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | 2,345,179,235 | 200,000,000 | | | | 2,310,897,846 | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI | 3,296,250,000 | 6,723,552,480 | 4,712,451,297 | | | | | 3,103,130,045 | 6,196,831,777 | 4,543,331,484 | | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi | 1,860,960,000 | 5,848,160,000 | 3,665,293,497 | | | | | 1,847,313,000 | 5,636,594,377 | 3,613,781,184 | | | | | | | |
| Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government | 1,228,690,000 | 411,787,480 | 321,257,800 | | | | | 1,059,308,045 | 368,616,000 | 210,970,000 | | | | | | | |
| Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah | 169,000,000 | 265,325,000 | 625,000,000 | | | | | 159,400,000 | 39,950,000 | 623,095,500 | | | | | | | |
| Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi | 37,600,000 | 92,500,000 | 100,900,000 | | | | | 37,109,000 | 79,068,000 | 95,484,800 | | | | | | | |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi | - | 105,780,000 | - | | | | | - | 72,603,400 | - | | | | | | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | | | | 2,078,149,627 | 3,252,327,683 | | | | | 2,041,869,340 | | | | | | | |
| Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 421,988,000 | 95,000,000 | | | | | 408,992,535 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | | | | 76,778,000 | 45,000,000 | | | | | 76,522,035 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 345,210,000 | 50,000,000 | | | | | 332,470,500 | | | | | | | |
| Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 1,656,161,627 | 3,157,327,683 | | | | | 1,632,876,805 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | 1,381,660,530 | 3,031,810,000 | | | | | 1,359,264,005 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | 224,500,000 | 82,489,683 | | | | 224,045,000 | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 50,001,097 | 43,028,000 | | | | 49,567,800 | | | | | | | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN | 534,926,107 | 1,431,917,785 | 46,338,600 | | - | 497,317,220 | 1,058,824,416 | 46,338,600 | | - | | | | | | | |
| Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard | - | - | - | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah | 152,720,000 | 31,175,000 | - | | | 135,109,000 | 8,934,200 | - | | | | | | | | | |
| Pengembangan Satu Data/ One Data | - | - | - | | | - | - | - | | | | | | | | | |
| Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 340,799,622 | 1,303,864,000 | 40,500,000 | | | 325,001,500 | 989,090,216 | 40,500,000 | | | | | | | | | |
| Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian | 41,406,485 | 12,633,785 | 5,838,600 | | | 37,206,720 | 1,000,000 | 5,838,600 | | | | | | | | | |
| Pengembangan, pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan data/informasi/statistik daerah | - | 84,245,000 | - | | | - | 59,800,000 | - | | | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | | | | 240,774,987 | 254,244,636 | | | | 231,384,987 | | | | | | | | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi | | | | 240,774,987 | 254,244,636 | | | | 231,384,987 | | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | 164,939,574 | 148,730,900 | | | | 156,428,950 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | 75,835,413 | 105,513,736 | | | | 74,956,037 | | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | | | | 559,048,901 | 124,847,492 | | | | 178,736,835 | | | | | | | |
| Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 500,776,000 | 72,700,000 | | | | 146,008,253 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 300,000,000 | | | | | - | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 116,004,000 | 34,358,000 | | | | 77,186,358 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 84,772,000 | 38,342,000 | | | | 68,821,895 | | | | | | | |
| Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi | | | | 58,272,901 | 52,147,492 | | | | 32,728,582 | | | | | | | |
| Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | | | | 58,272,901 | 52,147,492 | | | | 32,728,582 | | | | | | | |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengembangan pelayanan Dinas Kominfo Prov. Kep. Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Bangka Belitung, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan Teknologi. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Bangka Belitung tentu saja perlu dorongan *good will* dari pimpinan dan *stake holder* lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis di samping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan TIK.

1. Tantangan

- Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik yang cepat dan tepat;
- Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan publik;
- Belum kuatnya jejaring informasi antar PD Pemprov Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negatif;
- Penyusunan media informasi berbasis teknologi informasi guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi;
- Penyusunan sistem informasi dan komunikasi secara bertahap di lingkungan pemerintah Provinsi

- kepulauan Bangka Belitung dalam menunjang pengambilan keputusan;
- Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi yang belum merata;
 - Fasilitasi pengembangan jaringan komunikasi antar daerah yang efektif sebagai infrastruktur dasar dalam menunjang alih pengalaman dan data sumber daya antar daerah;
 - Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK dan Statistik Sektoral;
 - Data statistik sektoral yang terintegrasi melalui *Single Data System*;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
 - Peningkatan kapasitas SDM.

2. Peluang

- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik;
- Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah;
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan;
- Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
- Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
- Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan

- Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Kebutuhan organisasi yang semakin meningkat
- Komitmen semua unsur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas
- Potensi pemanfaatan TIK tidak terbatas pada sektor tertentu;
- Peluang investasi di TIK tinggi dan pertumbuhan industri kreatif di bidang TIK yang cukup pesat;
- Minat investor mulai meningkat seiring perbaikan layanan perijinan dan iklim investasi yang membaik;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya berfungsi sebagai penyebarluasan informasi melalui Teknologi Informasi pada 5 (lima) tahun ke depan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat akan pentingnya informasi.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, identifikasi Pemetaan permasalahan pelayanan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel 3.1.

TABEL 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

| URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | |
|---|---------------------------|--|
| URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM | URUSAN DAERAH DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
| PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik |
| Permasalahan dalam mencapai target indikator antara lain: | | |
| a. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal; | | |
| 1. Perlu peningkatan layanan pengaduan masyarakat yang baik secara elektronik serta peningkatan kehumasan dan komunikasi publik serta diseminasi informasi dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung. | | |
| 2. Perlunya peningkatan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pelaku jurnalistik; | | |
| 3. Perlunya analisis berbasis teknologi terhadap berita dan informasi yang berkembang di media cetak, elektronik, maupun sosial; | | |
| 4. Perlunya Monev KIP oleh KID; | | |

| | | |
|--|--------------------|--|
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | PENGELOLAAN | Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik |
| <p>Permasalahan dalam mencapai target indikator antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal dimana Perlunya peningkatan tata kelola dan ekosistem eGovernment dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan; 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal dimana perlunya Perlu peningkatan Pembangunan fiber optic, peningkatan layanan kapasitas bandwidth, peningkatan sarana dan prasarana data center yang memenuhi standar, peningkatan sarana dan prasarana DRC (Disaster Recovery Center), peningkatan integrasi infrastruktur TIK serta peningkatan integrasi aplikasi layanan publik dalam rangka mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan Kepulauan Bangka Belitung. 3. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi; 4. Pembangunan aplikasi dengan <i>platform</i> dan struktur berbeda; | | |

| URUSAN BIDANG STATISTIK | | |
|--|-------------------------------------|---|
| URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH | URUSAN DAERAH DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
| PROGRAM STATISTIK SEKTORAL | PENYELENGGARAAN | Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah |
| <p>Permasalahan dalam mencapai target indikator antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal dimana Perlunya peningkatan integrasi data, peningkatan kapasitas pengelola data sektoral, peningkatan kemudahan akses publik terhadap data sektoral dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government. 2. Keterbukaan badan publik belum optimal dimana Perlunya peningkatan pemahaman terkait Daftar Informasi Publik (DIP), serta peningkatan kesadaran badan publik terhadap keterbukaan informasi dalam rangka mendukung terwujudnya Open Government. | | |

| URUSAN BIDANG PERSANDIAN | | |
|--|--|---|
| URUSAN/BIDANG PEMERINTAH DAERAH | URUSAN DAERAH DAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
| PROGRAM PENGAMANAN INFORMASI | PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK | Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah |
| <p>Permasalahan di bidang Persandian dan Keamanan Informasi antara lain:</p> | | |

Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum optimal sehingga perlunya peningkatan kualitas Self Assessment keamanan informasi dan persandian, peningkatan fasilitas sarana pendukung keamanan informasi di setiap PD, peningkatan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian, peningkatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah serta peningkatan sistem komunikasi intra pemerintah dalam rangka peningkatan Cyber Security.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi III : Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance)

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka Diskominfo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk merumuskan, melaksanakan, memantau, monitoring dan pelaporan kebijakan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan statistik sektoral, domain instansi penyelenggara negara, persandian, penetapan pola hubungan komunikasi sandi yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2.

Keterkaitan Fungsi Diskominfo dengan Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

| FUNGSI DISKOMINFO | MISI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2023-2026 | TUJUAN DAN SASARAN |
|--|---|---|
| 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi; | Misi 3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) | Tujuan: Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi |
| 2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi; | | Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan |
| 3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika | | Tujuan : Peningkatan tata Kelola pemerintahan berbasis elektronik |
| 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; | | |
| 5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Sasaran : 1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi; 2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral.; 3. Meningkatkan Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.</p> |
|--|--|--|

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan agenda Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan

pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2019-2024 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Tantangan dan potensi program Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung seluruh fokus pembangunan pemerintah Indonesia tahun 2019-2024, antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Indonesia;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi;
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (Palapa Ring);
4. Meningkatnya citra pemerintah di mata masyarakat versus turunnya kinerja pemerintah terkait hasil-hasil pembangunan;
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Sedangkan tantangan dan potensi program Universal Service Obligation (USO) yang mendukung 4 (empat) fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi;
2. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU;
3. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian;
4. Kebutuhan radio keselamatan untuk nelayan.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM, dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

sebagai leading sektor. Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian focus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2019-2024 disusun dengan 4 Fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran;
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran;
4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari system birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

3.3.2. Renstra BSSN RI

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah menyatakan bahwa visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia untuk tahun 2005–2025 adalah : Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur. Untuk mewujudkan visi

tersebut, terdapat 8 (delapan) misi Pembangunan Nasional dan salah satunya adalah misi untuk mewujudkan “Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu”, yang kemudian ditegaskan bahwa ”keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, pembangunan keamanan dalam negeri, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya serta berwawasan nusantara.” Konsep mengenai “keamanan nasional” yang ditegaskan di dalam RPJPN tersebut sangat penting karena telah menyatukan aspek pertahanan dan keamanan.

Visi-Misi Presiden RI 2019-2024, selanjutnya diterjemahkan dalam 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang disebut dengan ‘NAWA CITA’, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia

Peran BSSN RI dalam rangka dukungan pada Prioritas ke -1, prioritas ke-8 dan prioritas ke-9.

TUGAS DAN FUNGSI BSSN

BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanansiber.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSSN menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insidendan/atau serangan siber;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atauserangan siber;
3. Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
4. Pengeordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;

5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan BSSN; dan
8. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.

Visi dan MISI BSSN

Visi menjadi institusi terpercaya dalam menjaga keamanan Siber dan Sandi Negara dengan menyinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut serta mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Misi :

1. Menjamin keamanan informasi di sector pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi yang komprehensif
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industry dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi
4. membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan system identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihan terhadap ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi
5. membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia
6. menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Potensi BSSN

Pembentukan BSSN merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kekuatan Negara menghadapi ancaman siber di Indonesia. Pembentukan BSSN berpotensi memperkuat kebijakan di bidang keamanan siber dan sandi seluruh stakeholder di bidang siber, serta menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan mengonsolidasikan masyarakat, akademisi, praktisi, dan komunitas siber di dalam dan luar negeri. Keberadaan BSSN diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan siber Indonesia dalam bentuk koordinasi dan kerjasama antara institusi dan pemangku kepentingan di bidang siber di Indonesia, yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia (cyber crime), TNI/Kementerian Pertahanan (cyber defense), Kementerian Luar Negeri (cyber diplomacy) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tidak tertutup kemungkinan juga dengan lembaga-lembaga lainnya Potensi BSSN dalam meningkatkan keamanan siber dan sandi sangat besar, mengingat BSSN dapat bekerja sama dengan lembaga keamanan siber di negara-negara maju lainnya. BSSN juga dapat melakukan benchmark to best practice pada lembaga lembaga keamanan siber di Negara lain yang lebih maju.

Pembentukan BSSN meningkatkan potensi pengembangan SDM yang profesional di bidang keamanan siber di Indonesia. Dalam konteks SDM siber, BSSN berpotensi membangun SDM siber yang professional dan adaptif terhadap teknologi (technology adaptive) baik untuk kebutuhan internal maupun nasional. Keberadaan BSSN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan SDM siber yang menguasai teknologi informasi yang terus berkembang pesat di Indonesia. Adapun dalam konteks kinerja, BSSN berpotensi membangun system manajemen kinerja yang member peluang dan penghargaan kepada inovasi-inovasi baru di bidang keamanan siber di Indonesia. BSSN dapat membangun budaya dan perilaku untuk meningkatkan produktifitas dan profesionalisme SDM dalam bidang keamanan siber dengan menginisiasi pemberian

penghargaan di bidang keamanan siber untuk berbagai organisasi, baik pemerintah maupun swasta bahkan untuk tingkat individu. Pembentukan dan penguatan BSSN juga menciptakan peluang-peluang yang dapat dioptimalkan agar BSSN dapat berperan secara maksimal, diantaranya dalam penyusunan Undang-Undang yang membantu penguatan kewenangan dan dukungan anggaran yang kuat bagi program-program pengamanan siber dan sandi di Indonesia.

Tantangan BSSN RI

BSSN memiliki tantangan besar agar mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. BSSN berada di garis terdepan dalam mengembangkan kapabilitas unggul SDM siber dan sandi sehingga deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritikal nasional (critical infrastructure), dan ekonomi digital (e-commerce).

BSSN di masa depan diharapkan dapat berperan besar dalam memberikan edukasi kepada publik/masyarakat di bidang keamanan siber, dapat mengambil peran penting dalam pengendalian informasi dan berita palsu (hoax) melalui literasi-literasi terkait, serta menjadi juru bicara representatif dalam menghadapi beberapa kejadian nasional di bidang keamanan siber dan menjadi wakil Indonesia di forum-forum siber internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan BSSN.

Selain melaksanakan tupoksi di bidang keamanan siber, BSSN juga tetap mengemban tupoksi di bidang penyelenggaraan persandian untuk pemerintah atau negara. Dalam konteks revitalisasi persandian, maka BSSN memiliki tantangan untuk tetap melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di seluruh instansi pemerintah, baik di pusat, maupun di daerah, melaksanakan kegiatan terkait analisis sinyal, modernisasi dan sertifikasi peralatan sandi, mengembangkan peralatan sandi karya mandiri, melaksanakan

audit persandian secara sistematis dan terintegrasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian kriptografi serta terus melakukan pengembangan standar kriptografi nasional Permasalahan BSSN RI.

Berbagai permasalahan yang ada sehingga di butuhkan peran aktif dari BSSN RI adalah:

- 1) Jumlah serangan siber terbanyak ke Indonesia adalah virus malware /trojan-activity sebesar 92% dari total 20.033.257 serangan siber (Jan-Mei 2019).
- 2) Fenomena digitalisasi pada sektor jasa dan keuangan serta meningkatnya pengguna internet dengan penetrasi sebesar 56% (Jan 2019).
- 3) BSSN hanya memiliki satu sistem monitoring Mata Garuda yang belum mampu mencakup seluruh titik rentan di Indonesia.
- 4) Belum ada pusat informasi terpadu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber informasi dan aduan keamanan siber.
- 5) Belum ada mekanisme integrasi dan sharing data informasi serangan siber antar stakeholder terkait.

Tujuan Renstra BSSN RI

1. Tercapainya fondasi struktur, system dan budaya organisasi BSSN yang kuat.
2. Tersusunnya kebijakan, system dan prosedur berstandar global dalam bidang keamanan siber dan sandi di Indonesia.
3. Tersedianya system manajemen talenta untuk menarik, memelihara dan meretensi SDM siber dan sandi terbaik.
4. Tercapainya kinerja pencegahan, deteksi, mitigasi, dan penanggulangan ancaman keamanan siber dan sandi.
5. Terselenggaranyakerjasama-kerjasama strategis dengan seluruh pihak untuk membangun keamanan siber dan sandi di Indonesia.
6. Terbentuknya kesadaran, perilaku dan budaya keamanan siber yang baik pada setiap warganegara Indonesia.

3.3.3. Renstra Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Dokumen renstra Badan Pusat Statistik tidak dapat menjadikan acuan bagi dokumen Renstra Pemerintah Daerah. Berdasarkan amanat pada lampiran UU 23/2014 yaitu pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta kabupaten/kota, pada huruf T pembagian urusan pemerintahan bidang statistik pemerintah pusat adalah penyelenggaraan statistik dasar sedangkan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan statistik sektoral lingkup daerah provinsi, sehingga antara pusat dan daerah untuk urusan pemerintahan bidang statistik tidak ada hubungan kerja secara langsung karena lingkup kerjanya yang berbeda.

Tabel 3.4.

**Telaah Renstra K/L dan Renstra
Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

| NO | KEBIJAKAN RENSTRA K/L | TUPOKSI DISKOMINFO (Pergub 6/2021) | PERMASALAHAN | FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG |
|----|----------------------------|--|---|---|
| | KEMENTERIAN KOMINFO | 1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan provinsi; 2. Penyusunan program dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika; 3. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika; 4. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; | 1. Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE masih belum optimal. 2. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal. 3. Pemenuhan variabel pada domain layanan SPBE masih belum optimal. 4. Ketersediaan data sektoral belum optimal. 5. Pemanfaatan data sektoral belum optimal. 6. Keterbukaan badan publik belum optimal. 7. Tingginya resiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assessment</i> . | Penghambat: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Belum optimal; b. Koordinasi internal belum optimal; c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai. Pendorong: a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah; b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik utama ; c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral ; d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian dan pengelolaan keamanan informasi |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| 1 | Integrasi database dan layanan eGovernment di instansi pemerintahan | | | |
| 2 | Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi. | | | |
| 3 | Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik. | | | |
| 4 | Penyediaan infrastruktur broadband melalui jaringan backbone serat optik palapa ring. | | | |
| | BSSN | | | |
| 1 | Meningkatnya keamanan informasi nasional melalui persandian. | | | |
| 2 | Meningkatnya deteksi dini ancaman terhadap keamanan nasional. | | | |
| | BADAN PUSAT STATISTIK | | | |
| 1 | Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. | | | |
| 2 | Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat. | | | |
| 3 | Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik. | | | |

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034. Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya

perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Rencana implementasi program dan kegiatan Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun yang akan datang (Tahun 2017-2022) tidak ada yang bersifat pembangunan fisik dengan skala besar sehingga harus mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pengaturan zonasi ataupun pemanfaatan ruang dalam dokumen RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian pula terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022, tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan Kominfo, Statistik, Persandian serta Fungsi Penunjang Pemerintahan yang akan berdampak strategis (besar) terhadap lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan di atasnya. Hal ini bertujuan agar rumusan isu strategis yang dihasilkan dapat sinkron dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional dan kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi bagi kabupaten/kota. Sinkronisasi langkah dan kebijakan pembangunan daerah terhadap isu-isu strategis tetap berlandaskan bahwa pembangunan daerah tidak saja memanfaatkan peluang dimasa datang, tak kalah penting, perencanaan daerah juga harus menghasilkan ide dan langkah untuk menciptakan peluang itu sendiri.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kepulauan Bangka Belitung jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan publik masih belum optimal;
2. Integrasi aplikasi layanan publik, tata kelola dan ekosistem eGovernment belum optimal;
3. Penyebarluasan informasi dan komunikasi publik belum optimal.
4. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data statistik sektoral;
5. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2023-2026 yaitu Peningkatan Tata Kelola Berbasis Elektronik. Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi;
2. Termanfaatkannya data dan informasi statistik sectoral;
3. Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE.

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL KINERJA | | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | KONDISI AKHIR |
|----|--|---|---|---|----------------------|------|---|------|------|------|---------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi; | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE | 2.60 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.00 |
| | | | Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral. | Laju pemanfaatan data sektoral (%). | | | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% |
| | | | Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

TABEL 4.2**TUJUAN, SASARAN SERTA INDIKATOR YANG BERKAITAN DENGAN KESEKRETARIATAN**

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | | KONDISI AWAL KINERJA | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
|---|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|----------------|------|------|------|--|---------------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| Mewujudkan Reformasi birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatkan Tata Kelola internal Perangkat Daerah | Nilai RB Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Pelayan Internal PD | 70 | 75 | 80 | 81 | 82 | 83 | | 83 |
| | | | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 78 | 80 | 80 | 82 | 84 | 86 | | 86 |

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Diskominfo merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

| Misi 3. Mewujudkan ketatapemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) | | | |
|--|---|--|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan | Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | 1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui diseminasi open data. 3. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi. 4. Penguatan pengelolaan dan peningkatan kualitas pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik. |
| Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik | Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Untuk Pelayanan Administrasi Pemerintahan dan Publik yang terintegrasi; | 1. Menyusun rencana induk SPBE. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK. 3. Meningkatkan aplikasi yang terintegrasi. 4. Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik. 5. Meningkatkan kualitas pelayanan penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik. | |
| | Termanfaatkannya data dan informasi statistik sektoral. | 1. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral; 2. Meningkatkan diseminasi data badan publik. | |
| | Terwujudnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE | 1. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah; 2. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah. 3. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah. | |

| | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|
| Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi. | Meningkatkan Tata Kelola Internal PD | 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja 2. Meningkatkan kapasitas SDM; 3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja; 4. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif. 2. Penguatan kapasitas SDM. 3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. 4. Penguatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan. |
|--|--------------------------------------|--|--|

Pada setiap arah kebijakan memiliki fokus pada setiap tahunnya. Selengkapnya untuk fokus tahunan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Strategi dan Arah Kebijakan serta Fokus Tahunan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

| STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | FOKUS KEBIJAKAN | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Menyusun rencana induk SPBE. 2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur TIK. 3. Meningkatkan | 1. Penguatan pemerintahan berbasis elektronik melalui pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. | Penguatan infrastruktur dan SDM bidang TIK. | Penguatan infrastruktur dan SDM bidang TIK. | Penyusunan Rencana Induk SPBE. | Monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE. |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| <p>aplikasi yang terintegrasi.</p> <p>4. Meningkatkan Layanan Pengaduan Elektronik.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas pelayanan penguatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi dan komunikasi publik.</p> | <p>2. Penguatan pengelolaan kualitas penyebaran dan pemerataan informasi publik.</p> | <p>Peningkatan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa maupun media komunikasi lainnya serta kemitraan media.</p> | <p>Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan pengelola informasi publik.</p> | <p>Peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas.</p> | <p>Monitoring dan evaluasi peningkatan layanan informasi publik.</p> |
| <p>6. Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral;</p> <p>7. Meningkatkan keterbukaan badan publik.</p> | <p>3. Penguatan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui keterbukaan informasi publik.</p> | <p>Peningkatan kualitas SDM statistik.</p> | <p>Peningkatan kualitas SDM statistik.</p> | <p>Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi.</p> | <p>Meningkatkan ketersediaan data dan informasi sektoral melalui SDS dan open data untuk mendukung keterbukaan informasi.</p> |
| <p>8. Melaksanakan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah;</p> <p>9. Meningkatkan kapasitas pengelola keamanan informasi dan persandian daerah.</p> <p>10. Menyusun pedoman standar keamanan informasi dan persandian daerah.</p> | <p>4. Penguatan persandian untuk pengamanan informasi.</p> | <p>Peningkatan sarana pendukung persandian.</p> | <p>Penguatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.</p> | <p>Penguatan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.</p> | <p>Pembinaan dan pengendalian standarisasi persandian dan keamanan informasi.</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| <p>11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas SDM;</p> <p>13. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja;</p> <p>14. Meningkatkan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> | <p>1. Peningkatan perencanaan dan evaluasi yang komprehensif.</p> | <p>Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.</p> | <p>Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.</p> | <p>Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.</p> | <p>Penguatan sistem perencanaan dan evaluasi secara komprehensif.</p> |
| | <p>2. Penguatan kapasitas SDM.</p> | <p>Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.</p> | <p>Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.</p> | <p>Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.</p> | <p>Peningkatan Kapasitas SDM disetiap unit/bidang dan penambahan JFT.</p> |
| | <p>3. Penguatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.</p> | <p>Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.</p> | <p>Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.</p> | <p>Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.</p> | <p>Pemeliharaan sarpras dan layanan umum.</p> |
| | <p>4. Penguatan sistem administrasi umum dan keuangan serta kearsipan.</p> | <p>Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.</p> | <p>Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.</p> | <p>Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.</p> | <p>Penguatan administrasi pelayanan umum dan keuangan.</p> |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Sebagaimana tertuang pada RPD 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomenklatur KEPMENDAGRI NO. 050_5889 Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Dan Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif. Di samping itu direncanakan pula kebutuhan pendanaan dari program dan kegiatan secara indikatif dan bertahap selama 5 (lima) tahun. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program, sedangkan program berperan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang selanjutnya berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi. Disisi lain posisi kegiatan dalam rangkaian perencanaan ini adalah berada pada bagian ujung pelaksanaan atau merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan serta visi dan misi. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel 6.1.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

| NO | PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN, SUB KEGIATAN (OUTPUT) | DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN | CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | KONDISI AKHIR | | PD PENANGGUNG JAWAB | LOKASI |
|------|---|--|--|--|----|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Nilai Sakip PD | | | | 82 | 12,671,000,000 | 83 | 12,971,000,000 | 84 | 13,271,000,000 | 85 | 13,576,000,000 | 85 | Rp 13,576,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.01 | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | | | 13 | Rp 330,000,000 | 13 | Rp 360,000,000 | 13 | Rp 390,000,000 | 13 | Rp 420,000,000 | 13 | Rp 420,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | <i>Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> | Jumlah dokumen perencanaan | | | | 6 | 210,000,000 | 6 | 230,000,000 | 6 | 250,000,000 | 6 | 270,000,000 | 6 | Rp 270,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 07 | <i>Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i> | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 7 | 120,000,000 | 7 | 130,000,000 | 7 | 140,000,000 | 7 | 150,000,000 | 7 | Rp 150,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| | | Indeks kepuasan pelayanan internal (DISKOMINFO) | | | | 90 | 12,341,000,000 | 90 | 12,611,000,000 | 90 | 12,881,000,000 | 90 | 13,156,000,000 | 90 | Rp 13,156,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan keuangan (Diskominfo) | | | | 90 | 7,730,000,000 | 90 | 7,930,000,000 | 90 | 8,130,000,000 | 90 | 8,330,000,000 | 90 | Rp 8,330,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------|------------|---------------|
| 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 12 | 7,700,000,000 | 12 | 7,900,000,000 | 12 | 8,100,000,000 | 12 | 8,300,000,000 | 12 | Rp 8,300,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 10 | 30,000,000 | 10 | 30,000,000 | 10 | 30,000,000 | 10 | 30,000,000 | 10 | Rp 30,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah BMD yang teradministrasi sesuai dengan peraturan | | | | 17 | 50,000,000 | 19 | 60,000,000 | 25 | 70,000,000 | 30 | 80,000,000 | 30 | Rp 80,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | 17 | 50,000,000 | 19 | 60,000,000 | 25 | 70,000,000 | 30 | 80,000,000 | 30 | Rp 80,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian (Diskominfo) | | | | 90 | 195,000,000 | 90 | 195,000,000 | 90 | 195,000,000 | 90 | 195,000,000 | 90 | Rp 195,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 09 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | 3 | 25,000,000.00 | 3 | 25,000,000.00 | 3 | 25,000,000.00 | 3 | 25,000,000.00 | 3 | Rp 25,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 10 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 | 60,000,000.00 | 1 | 60,000,000.00 | 1 | 60,000,000.00 | 1 | 60,000,000.00 | 1 | Rp 60,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|------------|---------------|
| 11 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 3 | 5,000,000.00 | 3 | 5,000,000.00 | 3 | 5,000,000.00 | 3 | 5,000,000.00 | 3 | Rp 5,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 12 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi pepegawaian | | | | 3 | 25,000,000.00 | 3 | 25,000,000.00 | 3 | 25,000,000.00 | 3 | 25,000,000.00 | 3 | Rp 25,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 13 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan | | | | 10 | 80,000,000.00 | 10 | 80,000,000.00 | 10 | 80,000,000.00 | 10 | 80,000,000.00 | 10 | Rp 80,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.06 | Administrasi Umum Perangkat (Diskominfo) | Indeks Kepuasan Pelayanan Adminstras Umum Perangkat Daerah (Diskominfo) | | | | 90 | 626,000,000 | 90 | 686,000,000 | 90 | 746,000,000 | 90 | 811,000,000 | 90 | Rp 811,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 3 | 20,000,000 | 2 | 20,000,000.00 | 2 | 20,000,000.00 | 2 | 20,000,000.00 | 2 | Rp 20,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 | 60,000,000 | 2 | 65,000,000.00 | 2 | 70,000,000.00 | 2 | 80,000,000.00 | 2 | Rp 80,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 | 60,000,000 | 4 | 65,000,000.00 | 4 | 70,000,000.00 | 4 | 75,000,000.00 | 4 | Rp 75,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 | 45,000,000 | 4 | 45,000,000.00 | 4 | 45,000,000.00 | 4 | 45,000,000.00 | 4 | Rp 45,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|--|----|-------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|------------|---------------|
| 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | 3 | 15,000,000 | 3 | 15,000,000.00 | 3 | 15,000,000.00 | 3 | 15,000,000.00 | 3 | Rp 15,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | | 2 | 66,000,000 | 2 | 66,000,000.00 | 2 | 66,000,000.00 | 2 | 66,000,000.00 | 2 | Rp 66,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | | | 12 | 60,000,000 | 12 | 60,000,000.00 | 12 | 60,000,000.00 | 12 | 60,000,000.00 | 12 | Rp 60,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 12 | 300,000,000 | 12 | 350,000,000.00 | 12 | 400,000,000.00 | 12 | 450,000,000.00 | 12 | Rp 450,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskominfo) | Jumlah Barang Milik Daerah urusan Pemerintah yang diadakan (Diskominfo) | | | 10 | 630,000,000 | 8 | 630,000,000 | 8 | 630,000,000 | 8 | 630,000,000 | 8 | Rp 630,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | 3 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | 300,000,000 | 2 | Rp 300,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | 4 | 80,000,000 | 3 | 80,000,000 | 3 | 80,000,000 | 3 | 80,000,000 | 3 | Rp 80,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | 3 | 250,000,000 | 3 | 250,000,000 | 3 | 250,000,000 | 3 | 250,000,000 | 3 | Rp 250,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------|------------|---------------|
| 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo) | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(Diskominfo) | | | 9 | 2,160,000,000 | 9 | 2,160,000,000 | 9 | 2,160,000,000 | 9 | 2,160,000,000 | 9 | Rp 2,160,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | Rp 10,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | 12 | 600,000,000 | 12 | 600,000,000 | 12 | 600,000,000 | 12 | 600,000,000 | 12 | Rp 600,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | 50,000,000 | 12 | Rp 50,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | 12 | 1,500,000,000 | 12 | 1,500,000,000 | 12 | 1,500,000,000 | 12 | 1,500,000,000 | 12 | Rp 1,500,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Diskominfo) | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang di pelihara (Diskominfo) | | | 9 | 950,000,000 | 9 | 950,000,000 | 9 | 950,000,000 | 9 | 950,000,000 | 9 | Rp 950,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | Rp 100,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 4 | 140,000,000 | 4 | 140,000,000 | 4 | 140,000,000 | 4 | 140,000,000 | 4 | Rp 140,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | 20 | 60,000,000 | 20 | 60,000,000 | 20 | 60,000,000 | 20 | 60,000,000 | 20 | Rp 60,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 2 | 250,000,000 | 2 | 250,000,000 | 2 | 250,000,000 | 2 | 250,000,000 | 2 | Rp 250,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 2 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | Rp 200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | 6 | 200,000,000 | 6 | 200,000,000 | 6 | 200,000,000 | 6 | 200,000,000 | 6 | Rp 200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebarluasan informasi publik | | | 100 | Rp 10,850,000,000 | 100 | Rp 12,300,000,000 | 100 | Rp 12,300,000,000 | 100 | Rp 12,300,000,000 | 100 | Rp 12,300,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.01 | Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Provinsi | Presentase penyebarluasan informasi kebijakan/program/kegiatan pimpinan dan perangkat daerah melalui saluran komunikasi yang tersedia | | | 70 | Rp 10,850,000,000 | 80 | Rp 12,300,000,000 | 90 | Rp 12,300,000,000 | 100 | Rp 12,300,000,000 | 100 | Rp 12,300,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 04 | Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | 3 | 4,200,000,000.00 | 3 | 4,200,000,000.00 | 3 | 4,200,000,000.00 | 3 | 4,200,000,000.00 | 3 | Rp 4,200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|------------|---------------|
| 05 | Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | 4 | 1,200,000,000.00 | 4 | 1,200,000,000.00 | 4 | 1,200,000,000.00 | 4 | 1,200,000,000.00 | 4 | Rp 1,200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 06 | Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | | | 3 | 1,500,000,000.00 | 3 | 2,800,000,000.00 | 3 | 2,800,000,000.00 | 3 | 2,800,000,000.00 | 3 | Rp 2,800,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 12 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | | | 3 | 2,500,000,000.00 | 3 | 2,200,000,000.00 | 3 | 2,200,000,000.00 | 3 | 2,200,000,000.00 | 3 | Rp 2,200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | 12 | 50,000,000.00 | 12 | 200,000,000.00 | 12 | 200,000,000.00 | 12 | 200,000,000.00 | 12 | Rp 200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 10 | Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya | | | 100 | 200,000,000.00 | 100 | 200,000,000.00 | 100 | 200,000,000.00 | 100 | 200,000,000.00 | 100 | Rp 200,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 11 | Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah | | | 1 | 1,200,000,000.00 | 1 | 1,500,000,000.00 | 1 | 1,500,000,000.00 | 1 | 1,500,000,000.00 | 1 | Rp 1,500,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase ketersediaan infrastruktur, teknologi dan sistem elektronik. | | | 80 | 5,125,000,000 | 85 | 5,396,250,000 | 90 | 5,679,162,500 | 100 | 5,974,320,375 | 100 | Rp 5,974,320,375 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.01 | Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase PD layanan administrasi dan layanan publik yang memanfaatkan domain dan subdomain Pemda. | | | 70 | 610,000,000 | 80 | 640,500,000 | 90 | 672,125,000 | 100 | 704,931,000 | 100 | Rp 704,931,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--|--|----|---------------|----|---------------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------------|------------|---------------|
| 01 | Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi | | | 10 | 80,000,000 | 10 | 84,000,000 | 10 | 88,000,000 | 10 | 92,000,000 | 10 | Rp 92,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 03 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | 34 | 450,000,000 | 34 | 472,500,000 | 34 | 496,125,000 | 34 | 520,931,000 | 34 | Rp 520,931,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi | | | 2 | 80,000,000 | 2 | 84,000,000 | 2 | 88,000,000 | 2 | 92,000,000 | 2 | Rp 92,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.02 | Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provins | Presentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | | | 50 | 4,515,000,000 | 65 | 4,755,750,000 | 80 | 5,007,037,500 | 100 | 5,269,389,375 | 100 | Rp 5,269,389,375 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 02 | Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | 1 | 200,000,000 | 1 | 215,000,000 | 1 | 230,000,000 | 1 | 245,000,000 | 1 | Rp 245,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 03 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | | | 1 | 3,500,000,000 | 1 | 3,675,000,000 | 1 | 3,858,750,000 | 1 | 4,051,687,500 | 1 | Rp 4,051,687,500 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 04 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | 1 | 350,000,000 | 1 | 372,500,000 | 1 | 396,125,000 | 1 | 420,931,250 | 1 | Rp 420,931,250 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 07 | Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | | | 1 | 150,000,000 | 1 | 157,500,000 | 1 | 165,375,000 | 1 | 173,643,750 | 1 | Rp 173,643,750 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|-----|----------------|------------|---------------|
| 08 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | 10 | 200,000,000 | 12 | 215,000,000 | 14 | 230,000,000 | 16 | 245,000,000 | 16 | Rp 245,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 10 | Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 1 | 115,000,000 | 1 | 120,750,000 | 1 | 126,787,500 | 1 | 133,126,875 | 1 | Rp 133,126,875 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 2.20.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | | | | 60 | 305,000,000 | 75 | 383,250,000 | 80 | 402,100,000 | 100 | 421,580,000 | 100 | Rp 421,580,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi | Persentase OPD yang menghasilkan data sesuai Prinsip satu data Indonesia | | | | 75 | 305,000,000 | 85 | 383,250,000 | 95 | 402,100,000 | 100 | 421,580,000 | 100 | Rp 421,580,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | 1 | 100,000,000 | 1 | 84,000,000 | 1 | 88,200,000 | 1 | 92,610,000 | 1 | Rp 92,610,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 03 | SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun | | | | 10 | 80,000,000 | 12 | 84,000,000 | 15 | 88,200,000 | 17 | 92,610,000 | 17 | Rp 92,610,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 04 | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | | | | 68 | 125,000,000 | 68 | 131,250,000 | 68 | 137,500,000 | 68 | 143,750,000 | 68 | Rp 143,750,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------------|------------|---------------|
| 06 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun | | | | 100 | - | 200 | 84,000,000 | 300 | 88,200,000 | 400 | 92,610,000 | 400 | Rp 92,610,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 2.21.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Presentase tingkat keamanan informasi pemerintah daerah | | | | 65 | 716,000,000 | 75 | 748,000,000 | 85 | 780,000,000 | 100 | 809,000,000 | 100 | Rp 809,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 1.01 | Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase Penerapan Proteksi Keamanan Informasi Pemerintah | | | | 75 | 656,000,000 | 85 | 685,000,000 | 95 | 714,000,000 | 100 | 740,000,000 | 100 | Rp 740,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan | | | | 3 | 300,000,000 | 3 | 315,000,000 | 3 | 330,000,000 | 3 | 345,000,000 | 3 | Rp 345,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 03 | sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 1 | 116,000,000 | 1 | 122,000,000 | 1 | 128,000,000 | 1 | 134,000,000 | 1 | Rp 134,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 04 | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | 1 | 240,000,000 | 1 | 248,000,000 | 1 | 256,000,000 | 1 | 261,000,000 | 1 | Rp 261,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| | | Jumlah Laporan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh ASN di Lingkup Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Rp - | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan CSIRT Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Rp - | DISKOMINFO | Pangkalpinang |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|------------|---------------|
| 1.02 | Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi | Presentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam Jaringan Komunikasi Sandi | | | | 85 | 60,000,000 | 90 | 63,000,000 | 95 | 66,000,000 | 100 | 69,000,000 | 100 | Rp 69,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| 01 | Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | | | | 27 | 60,000,000 | 27 | 63,000,000 | 27 | 66,000,000 | 27 | 69,000,000 | 27 | Rp 69,000,000 | DISKOMINFO | Pangkalpinang |
| TOTAL PERTAHUN | | | | | | | Rp 29,667,000,000 | | Rp 31,798,500,000 | | Rp 32,432,262,500 | | Rp 33,080,900,375 | | Rp 33,080,900,375 | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat dimonitor dan dievaluasi.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan- penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPD

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD | TARGET CAPAIAN TAHUN | | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE |
|----|---|---------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------------------------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | |
| 2 | Laju pemanfaatan data sektoral (%). | 50% | 55% | 70% | 85% | 100% | 100% | |
| 3 | Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 merupakan rencana yang disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan dalam kurun waktu lima tahun untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibidang komunikasi dan infomatika.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya manusia merupakan komponen organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Semoga kedepan dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka terwujudnya *good governance* guna menuju terwujudnya masyarakat informasi yang mandiri dan beretika melalui komunikasi dan informatika.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JI. PULAU LEPAR KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**